

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PROGRAM BERAS MISKIN DALAM
UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT MENURUT EKONOMI ISLAM
(Studi Pada Masyarakat Desa Paloh Teungoh Kecamatan
Keumala Kabupaten Pidie)**



Disusun Oleh:

**MULYA FITRI
NIM. 150602106**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mulya Fitri
NIM : 150602106
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturannya yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 8 Juli 2022
Yang Menyatakan,



Mulya Fitri
Mulya Fitri

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ekonomi Syariah
Dengan Judul:

Implementasi Program Beras Miskin dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Ekonomi Islam (Studi Pada Masyarakat Desa Paloh Teungoh Kecamatan Keumala Kabupaten Pidie)

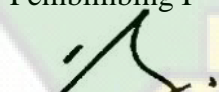
Disusun Oleh:

Mulya Fitri
NIM. 150602106

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian
studi pada Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Nilam Sari, Lc, M.Ag
NIP. 197103172008012007


Dara Amanatillah, M.ScFinn
NIP. 199206142019032039

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah


Dr. Nilam Sari, Lc, M.Ag
NIP. 197103172008012007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

JL. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax, 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id.

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Mulya Fitri
NIM : 150602106
Fakultas/Program/Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah
E-mail : mulyafitri123@gmail.com

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti, Non-Eklusif (*Non- exclusive Royalty-Frees Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi

yang berjudul:

Implementasi Program Beras Miskin dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Ekonomi Islam (Studi Pada Masyarakat Desa Paloh Teungoh Kecamatan Keumala Kabupaten Pidie) serta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak beban Royalti Non-Eklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

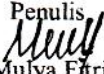
UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

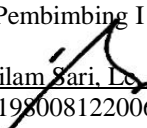
Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.


Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 8 Juli 2022

Mengetahui,

Penulis

Mulya Fitri
NIM. 150602106

Pembimbing I

Dr. Nilam Sari, Lc, MA
NIP. 198008122006041004

Pembimbing II

Dara Amanatillah, M.ScFinn
NIP. 199112102019032018

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Implementasi Program Beras Miskin Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Ekonomi Islam (Studi Pada Masyarakat Desa Paloh Teungoh Kecamatan Keumala Kabupaten Pidie)”. Shalawat beriringkan salam tidak lupa kita sanjung sajikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. dimana beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang sedang kita rasakan saat ini, yang telah mendidik seluruh umatnya untuk menjadi generasi terbaik di muka bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesulitan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad Chalil, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Nilam Sari, Lc.,M.Ag selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah selama menempuh pendidikan Program Studi Strata

Satu (S1) yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu kepada penulis

3. Muhammad Arifin, M.Ag, Ph.D selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
4. Dr. Nilam Sari, Lc.,M.Ag selaku pembimbing I sekaligus penasehat akademik (PA) dan Dara Amanatillah, M.ScFinn selaku pembimbing II yang tak bosan-bosannya memberi arahan dan nasehat bagi penulis demi kesempurnaan skripsi ini.
5. Dr. Muhammad Zulhilmi, S.Ag., M.A.selaku penguji I dan Junia Farma, M.Ag. selaku penguji II yang sudah memberi saran bagi penulis demi perbaikan skripsi ini.
6. Terima kasih juga kepada seluruh Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Seluruh informan yang telah membantu memberikan informasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas waktu dan informasi dari Bapak/Ibu yang sangat berharga bagi penulis.
8. Teristimewa kepada orang tua yang penulis cintai, Bapak Muhammad Abdullah dan Ibu Hamidah yang tak henti-hentinya mendo'akan dan memberikan semangat serta dorongan kepada penulis hingga skripsi ini selesai. Tanpa do'a dari kedua orang tua mungkin penulis tidak bisa menyelesaikan skripsi ini. Saudara kandung yang penulis sayangi yaitu Andy Mukhlis, Eva

Noverita, Ida Munira, Rizal Fahmi serta yang selalu memberikan motivasi, semangat dan dukungan kepada penulis.

9. Terima kasih untuk teman baik penulis dan juga teman-teman seperjuangan Program Studi Ekonomi Syariah Angkatan 2015 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu. Semoga segala bantuan yang diberikan menjadi amal ibadah dan mendapat imbalan pahala dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih ada kekurangan, oleh karena itu penulis mengharap kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 08 Juli 2022
Penulis,

Mulya Fitri

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Materi P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor:0543b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1.	ا	Tidak dilambangkan	16.	ط	T
2.	ب	B	17.	ظ	Z
3.	ت	T	18.	ع	'
4.	ث	Š	19.	غ	G
5.	ج	J	20.	ف	F
6.	ح	H	21.	ق	Q
7.	خ	Kh	22.	ك	K
8.	د	D	23.	ل	L
9.	ذ	Ẓ	24.	م	M
10.	ر	R	25.	ن	N
11.	ز	Z	26.	و	W
12.	س	S	27.	ه	H
13.	ش	Sy	28.	ء	,
14.	ص	Š	29.	ي	
15.	ض	Ḍ		Y	

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara hakikat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َـي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َـو	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

K◌◌◌

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
أَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ā
اِ	<i>Fathah dan wau</i>	Ī
اُ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

ala: قَالَ

ama: رَمَى

ila: قِيلَ

aqulu: يَقُولُ

4. Ta Marbutah (ة)

Trasliterasi untuk ta marbutoh ada dua.

- Ta *Marbutah* (ة) hidup
Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.
- Ta *marbutah* (ة) mati
Ta *marbutah* (ة) yang mati atas mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta

bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

raudah al-afal/raudatul afal : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

al-madinah al-munawwarah/ : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

al-madinatul munawwarah

talhah: طَلْحَةُ

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi. Seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Mulya Fitri
Nim : 150602106
Fakultas/Program studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul : Implementasi Program Beras Miskin Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Ekonomi Islam (Studi Pada Masyarakat Desa Paloh Teungoh Kecamatan Keumala Kabupaten Pidie)
Tanggal Sidang : 26 Juli 2022
Pembimbing I : Dr. Nilam Sari, Lc.M.Ag
Pembimbing II : Dara Amanatillah, M.Sc.Fin

Program beras miskin merupakan program bantuan beras bersubsidi dari pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau Rumah Tangga Sasaran (RTS), sebagai bentuk upaya pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial, masing-masing keluarga akan menerima minimal 10 kg/KK/bulan dititik distribusi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi program beras miskin di Desa Paloh Teungoh Kecamatan Keumala Kabupaten Pidie dalam mengatasi penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat menurut perspektif Islam. penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa implementasi program beras miskin di Desa Paloh Teungoh belum dapat dikatakan sejahtera. Karena keberhasilan program beras miskin ini tercapainya indikator 6T yaitu tepat sasaran, tepat harga, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas dan tepat administrasi. Sedangkan penyaluran beras miskin di Desa Paloh Teungoh belum memenuhi ke enam indikator tersebut. Jika ditinjau dari perspektif Islam juga belum dapat dikatakan sejahtera karena tidak memenuhi nilai-nilai dasar ekonomi Islam yaitu keadilan dan tanggung jawab.

Kata Kunci : *Program Raskin, Kesejahteraan, Perspektif Ekonomi Islam.*

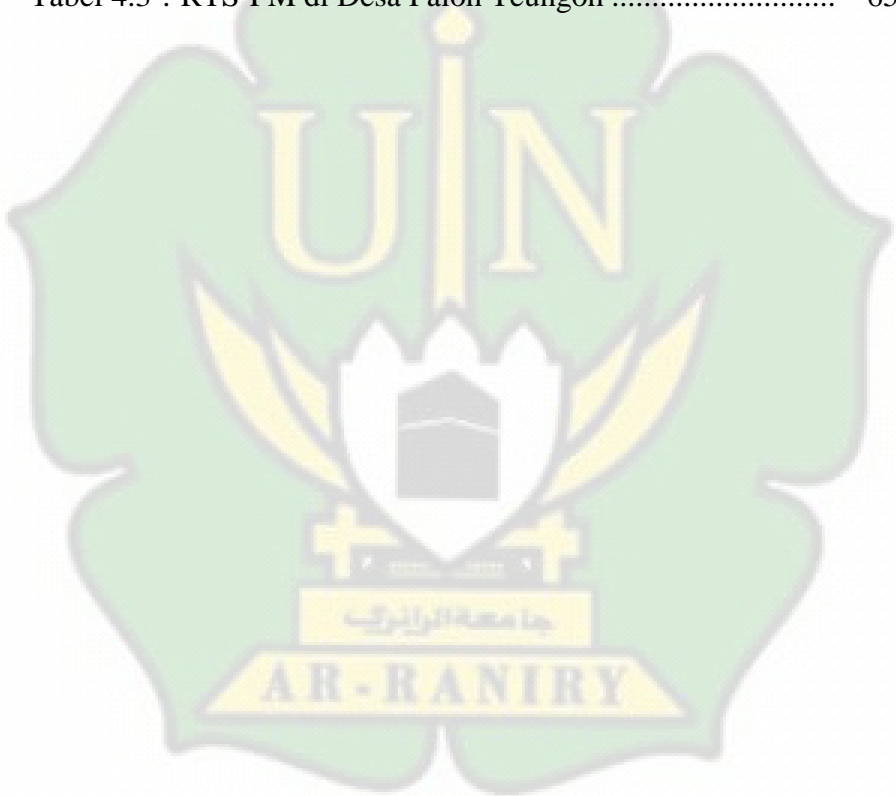
DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Sistematika Pembahasan	10
BAB II LANDASAN TEORI.....	12
2.1 Konsep Kemiskinan.....	12
2.1.1 Pengertian Kemiskinan	12
2.1.2 Ukuran Kemiskinan	14
2.1.3 Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan	15
2.1.4 Kemiskinan Menurut Ekonomi Islam	18
2.2 Program Beras Miskin (RASKIN) Untuk Masyarakat Miskin.....	23
2.2.1 Pengertian Program Beras Miskin	23
2.2.2 Tujuan Program Beras Miskin	25
2.2.3 Sasaran Program Beras Miskin	26
2.2.4 Kriteria Masyarakat Penerima Beras Miskin	26
2.3 Kesejahteraan Masyarakat.....	27
2.3.1 Pengertian Kesejahteraan	27

2.3.2 Indikator Kesejahteraan Masyarakat.....	29
2.4 Kesejahteraan Masyarakat Menurut Ekonomi Islam	33
2.4.1 Pengertian Kesejahteraan (Falah) Menurut Ekonomi Islam	33
2.4.2 Pengertian Kesejahteraan Masyarakat Menurut Ekonomi Islam	39
2.4.3 Indikator Kesejahteraan Masyarakat Menurut Ekonomi Islam	45
2.5 Temuan Penelitian Terkait	49
2.6 Kerangka Pemikiran	54
BAB III METODE PENELITIAN.....	56
3.1 Metode dan Jenis Penelitian	56
3.2 Lokasi Penelitian	56
3.3 Subjek dan Objek Penelitian	57
3.4 Sumber Data	57
3.5 Teknik Pengumpulan Data	58
3.6 Teknik Analisa Data	59
BAB IV HASIL DAN PENELITIAN.....	62
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	62
4.1.1 Keadaan Geografis Desa Paloh Teungoh	62
4.1.2 Keadaan Demografis Desa Paloh Teungoh	62
4.2 Implementasi Program Beras dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan	64
4.3 Implementasi Program Beras Miskin dalam Meningkatkan Kesejahteraan Menurut Ekonomi Islam...	70
BAB V PENUTUP	78
5.1 Kesimpulan.....	78
5.2 Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN	83
RIWAYAT HIDUP.....	87

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia.....	4
Tabel 2.1 : Penelitian Terkait.....	33
Tabel 4.1 : Jumlah Penduduk di Desa Paloh Teungoh	63
Tabel 4.2 : Jenis Mata Pencaharian Masyarakat di Desa Paloh Teungoh	63
Tabel 4.3 : RTS-PM di Desa Paloh Teungoh	65



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1: Kerangka Pemikiran 55



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara.....	83
Lampiran 2. Dokumentasi Penelitian	84



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi nasional sebagai upaya untuk membangun seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk mewujudkan salah satu tujuan nasional yaitu memajukan kesejahteraan umum, seperti tersurat pada alinea ke IV pembukaan UUD 1945. Pembangunan sebagai salah satu cermin pengamalan Pancasila terutama dijiwai sila kelima, *Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia* yaitu upaya peningkatan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada tercapainya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

Namun pengalaman pembangunan ekonomi Indonesia sering menimbulkan permasalahan sosial di masyarakat, yaitu persoalan kemiskinan. Kemiskinan tetap menjadi masalah yang tidak bisa dianggap mudah untuk diberikan solusi, karena masih banyaknya kelompok yang berada di bawah garis kemiskinan.

Kemiskinan merupakan hal yang klasik yang belum tuntas diselesaikan terutama di Negara berkembang, artinya kemiskinan menjadi masalah yang dihadapi dan menjadi perhatian di setiap Negara. Persoalan kemiskinan merupakan salah satu permasalahan pokok yang dihadapi bangsa Indonesia sejak dahulu hingga sekarang. Oleh karena itu kemiskinan merupakan masalah sosial yang harus diselesaikan, karena dapat mengakibatkan kesejahteraan

masyarakat menurun, angka kematian yang tinggi, akses pendidikan tertutup, pengangguran semakin banyak, dan dapat menyebabkan dampak negatif pada masyarakat sekitar dalam tingkat kejahatan seperti perampokan, pencurian, penculikan, dan pembunuhan. Banyak permasalahan yang diakibatkan oleh rantai kemiskinan karena tekanan perekonomian untuk memenuhi kebutuhan hidup kurang memadai.

Menurut pandangan Islam kemiskinan merupakan satu hal yang mampu membahayakan akhlak, kelogisan berpikir, keluarga dan juga masyarakat. Islam sendiri menanggapinya sebagai musibah dan bencana yang seharusnya memohon perlindungan kepada Allah SWT atas kejahatan yang tersembunyi di dalamnya, jika kemiskinan ini semakin merajalela, maka ini akan menjadi kemiskinan yang mampu membuatnya melupakan Allah SWT dan juga rasa sosialnya kepada sesama. Ini bagaikan seorang yang kaya yang kekayaannya menyebabkan ia seperti seorang raja, maka kekayaannya menjadikannya seorang yang zalim, baik itu kepada Allah SWT maupun sesama manusia, ada beberapa bentuk kezaliman seperti zalim kepada Allah SWT, kepada manusia, dan juga kepada dirinya sendiri (Huda & Dkk, 2015).

Padahal Allah SWT telah memberikan berbagai macam nikmat yang tidak terhingga dan tidak terbatas yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Seperti firman Allah :

إِنَّ وَعَاثَكُمْ مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ۚ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا ۗ
الْإِنسَن لظَلُومٌ كَفَّارٌ

Artinya :”Dan Dia telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu, sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah)”(Qs Ibrahim 14: 34).

Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk berkata bahwa sumber daya alam terbatas. Tetapi sikap manusia terhadap sesama dan sikapnya terhadap dirinya sendirilah yang menjadikan sebagian manusia tidak memperoleh sumber daya alam tersebut. Kemiskinan terjadi akibat adanya ketidakseimbangan dalam perolehan atau penggunaan sumber daya alam itu, yang diistilahkan oleh ayat di atas dengan sikap aniaya, atau karena keengganan manusia menggali sumber daya alam untuk mengangkatnya ke permukaan, atau untuk menemukan *alternatif* pengganti. Dan kedua hal terakhir inilah yang diistilahkan oleh ayat di atas dengan sifat kufur (Shihab, 2014).

Kemiskinan di Indonesia merupakan masalah sosial yang relevan untuk dikaji terus-menerus, sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia

No	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin
1	2016	28,01 juta jiwa
2	2017	26,58 juta jiwa
3	2018	25,95 juta jiwa
4	2019	25,14 juta jiwa
5	2020	27,55 juta jiwa
6	2021	26,50 juta jiwa

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa Angka kemiskinan di Indonesia dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 mengalami penurunan, namun setahun setelahnya mengalami peningkatan kemudian pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan. Maka dapat disimpulkan bahwa angka kemiskinan di Indonesia mengalami naik turun.

Dalam pasal 34 ayat (1) UUD 1945 menerangkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, maka secara tidak langsung pemerintah mempunyai kewajiban untuk menjamin kehidupan masyarakat miskin. Dalam mengatasi kemiskinan, pemerintah Indonesia saat ini memiliki beberapa program penanggulangan kemiskinan yang dibagi menjadi 3 Kluster, yaitu :

1. Kluster I yaitu Bantuan dan Perlindungan Sosial (Program Raskin, Jamkesmas, Beasiswa Miskin).

2. Kluster II yaitu Pemberdayaan Masyarakat (Program PNPM Mandiri).
3. Kluster III yaitu Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) (Prasetya & Pangesty, 2021).

Banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan, salah satunya yaitu Program Beras Miskin (Raskin). Raskin adalah subsidi pangan dalam bentuk beras yang diperuntukkan untuk rumah tangga yang berpenghasilan rendah sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial pencapaian indikator 6T, yaitu : tepat jumlah, tepat sasaran, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Mekanisme pembagian Raskin dimulai dengan pengiriman beras yang berasal dari Perum Bulog ke Kecamatan kemudian disalurkan ke Kelurahan kemudian disalurkan lagi ke masing-masing ketua. Melalui ketua setiap RT (keuchik), beras Raskin tersebut disalurkan kepada warga. Program Raskin ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras dan mencegah penurunan konsumsi energi dan protein. Selain itu, raskin bertujuan untuk meningkatkan atau membuka akses pangan keluarga melalui penjualan beras kepada keluarga penerima manfaat dengan jumlah yang telah ditentukan.

Program Raskin ini sebenarnya diawali dengan Program Operasi Pasar Khusus Beras pada tahun 1998. Operasi ini merupakan tindak lanjut dari adanya krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997, disertai kemarau kering serta bencana kebakaran hutan dan ledakan serangan hama belalang dan hama wereng coklat yang telah menyebabkan penurunan produksi pangan secara nyata. Penurunan ini dipicu kenaikan harga pupuk dan obat pemberantas hama yang cukup tinggi. Harga beras kemudian semakin meningkat naik sejak bulan Mei 1997 dan mencapai puncaknya sekitar Mei – Juni 1998.

Menghadapi situasi ini, pemerintah telah memutuskan membentuk Tim Pemantau Ketahanan Pangan yang prinsipnya merupakan *Food Crisis Center* atau pusat penanggulangan krisis pangan. Langkah ini ditindak lanjuti dengan diadakannya Operasi Pasar Khusus Beras yang operasionalnya dilakukan oleh BULOG.

Penunjukan BULOG untuk melaksanakan program ini antara lain karena beberapa alasan seperti persiapan sarana perdagangan, sumber daya manusia, dan stok beras BULOG yang tersebar di seluruh Indonesia. Setiap tahunnya program operasi pasar khusus (OPK) ini dievaluasi dan terus dilakukan penyempurnaan. Tahun 2002 program ini diganti menjadi program Raskin (beras miskin) dan pada tahun 2008 menjadi beras bersubsidi untuk masyarakat berpendapatan rendah. (Pedoman Umum (Pedum) Raskin, 2015).

Setiap tahun ditetapkan Kebijakan Program Raskin tentu juga dipayungi oleh berbagai macam aturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut: Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-undang No. 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Undang-undang APBN-P Tahun 2015, Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan, Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum BULOG, Peraturan Presiden RI No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Inpres No. 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/ Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah.

Perum Bulog Divisi Regional (Divre) Aceh, menyebutkan beras masyarakat miskin yang dialokasikan untuk provinsi Aceh sebanyak 64 ribu ton tiap tahunnya yang akan dibagikan ke 356.720 rumah tangga sasaran (RTS) yang tersebar di 23 kabupaten/kota. Setiap bulannya raskin yang dialokasikan itu sebesar 5.350 ton yang akan disalurkan di 289 titik di seluruh Aceh salah satunya di Desa Paloh Teungoh. Pengurus raskin di Paloh Teungoh Nyak Puteh menyebutkan bahwa rumah tangga sasaran (RTS) raskin yaitu sebanyak 63 KK dari 217 KK, untuk kriteria penerima raskin sendiri yaitu sama dengan pada umumnya yaitu fakir miskin/kurang mampu. Setiap KK akan mendapatkan 15 kg beras dengan harga beli 1.600 perkilo. Proses distribusi beras miskin ini akan dilakukan jika setiap kecamatan telah melakukan pembayaran penebusan. Namun pada tahun 2019 bantuan beras

raskin sudah diubah menjadi bansos yang disalurkan kepada warga miskin juga, berupa beras 10 kilogram, telur satu lemping dan minyak makan.

Pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 jumlah kartu keluarga di desa Paloh Teungoh bertambah menjadi 234 KK, dan juga penerima bansos bertambah menjadi 69 KK.

Maka berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI PROGRAM BERAS MISKIN DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MENURUT EKONOMI ISLAM (Studi Pada Masyarakat Desa Paloh Teungoh Kecamatan Keumala Kabupaten Pidie)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dan untuk memperjelas arah penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi program beras miskin dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Paloh Teungoh Kecamatan Keumala Kabupaten Pidie ?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap program beras miskin di Desa Paloh Teungoh Kecamatan Keumala Kabupaten Pidie ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada penjelasan yang sebelumnya maka dapat dituliskan bahwa tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu :

1. Untuk menganalisis bagaimana implementasi program beras miskin dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Paloh Teungoh, Kecamatan Keumala, Kabupaten Pidie.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap program beras miskin di Desa Paloh Teungoh Kecamatan Keumala Kabupaten Pidie.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini bagi peneliti, dapat digunakan untuk menambah pengetahuan dan pengalaman dalam lingkup masyarakat terutama masyarakat miskin tentang implementasi program beras miskin dalam upaya meningkatkan kesejahteraan di Desa Paloh Teungoh kecamatan Keumala, kabupaten Pidie dan dapat menjadi referensi dalam teoritis untuk penerus dimasa yang akan datang. Sedangkan hasil penelitian ini bagi Pendidikan, dapat dijadikan sebagai masukan yang membangun untuk meningkatkan kualitas dan Lembaga Pendidikan dan dapat menjadi tolak ukur terhadap mahasiswa yang menyelesaikan skripsi sesuai dengan tema.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi solusi kepada pengelola beras miskin di Desa Paloh Teungoh untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin lebih baik, sehingga akan lebih terbantu dalam hidup khususnya untuk makan.

1.5 Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai isi dari skripsi ini dengan susunan yang sistematis dan komprehensif. Sistematika penulisan dalam penelitian terdiri dari lima bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang berhubungan dengan penelitian yaitu terdiri dari pengertian implementasi, kemiskinan, program beras miskin, kesejahteraan dan kesejahteraan masyarakat miskin dalam perspektif islam.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini mencakup tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber

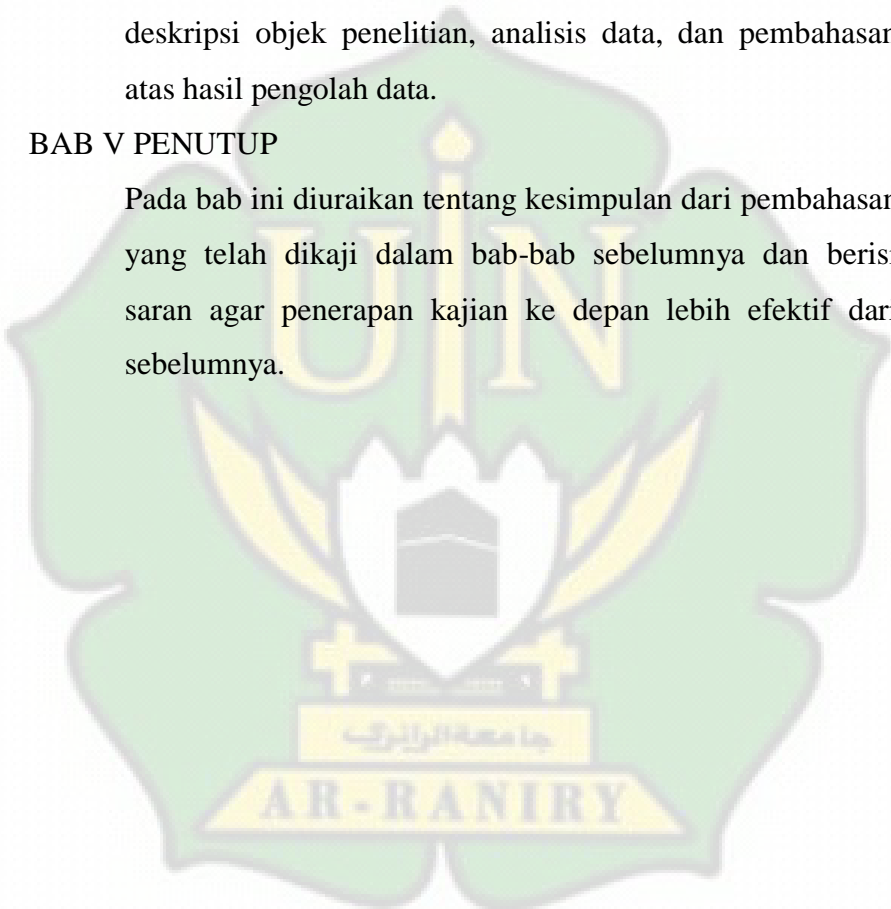
penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil dan analisis penelitian dalam bab ini diuraikan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, dan pembahasan atas hasil pengolahan data.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini diuraikan tentang kesimpulan dari pembahasan yang telah dikaji dalam bab-bab sebelumnya dan berisi saran agar penerapan kajian ke depan lebih efektif dari sebelumnya.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Kemiskinan

2.1.1 Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan menurut bahasa adalah tidak berharta, serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah). Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan (Alhudori, 2017).

Dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam arti luas, kemiskinan merupakan suatu fenomena *multiface* atau multidimensional (Suryawati, 2005). Kemiskinan itu bersifat multidimensional yaitu kebutuhan hidup manusia itu sangat bermacam-macam, maka kemiskinan pun memiliki banyak aspek. Kemiskinan tidak menyangkut masalah ekonomi saja tapi juga meliputi masalah social, budaya dan politik. Karena sifatnya yang multidimensional, maka kemiskinan juga memerlukan solusi yang multidimensional juga (Wulandari, 2014).

Dimensi-dimensi kemiskinan saling berkaitan, baik secara langsung maupun tak langsung. Hal ini berarti bahwa kemajuan atau kemunduran pada salah satu aspek dapat mempengaruhi kemajuan atau kemunduran pada aspek lainnya. Aspek lainnya dari

kemiskinan ini adalah bahwa yang itu adalah manusianya, baik secara individual maupun kolektif.

Dalam pandangan Islam, kemiskinan bukanlah suatu kenikmatan, kemiskinan adalah suatu bentuk ujian hidup. Dengan kemampuan dan potensi yang ada, ia harus diupayakan untuk dihindari, dan apabila kemiskinan tetap juga terjadi maka dalam Islam menyuruh kita untuk bersikap sabar, tawakkal dan juga disertakan dengan ikhtiar untuk melepaskan diri dari kemiskinan tersebut (Setiawan, 2016).

Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Abu Na'im :

كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا

Artinya : “Kemiskinan itu dekat kepada kekufuran”

Hadis diatas setidaknya memiliki tiga makna yaitu: pertama, orang miskin harus selalu waspada terhadap kemiskinannya. Hal ini disebabkan keadaan yang serba kekurangan dapat menggoda manusia untuk melakukan sesuatu yang tidak dibolehkan dalam islam guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Kedua, sebagai peringatan kepada orang yang lebih mampu atau berkecukupan bahwa kemiskinan yang dialami saudara-saudaranya yang miskin dapat mendorongnya kepada kekufuran, baik kufur ingkar adanya Tuhan maupun kufur terhadap perintah dan larangan Allah SWT. Maka oleh karena itu, orang yang lebih mampu (kaya) dianjurkan untuk melakukan zakat dan disunnahkan untuk

berseadakah kepada orang yang lebih membutuhkan. Zakat dan sedekah memiliki fungsi social yang sangat penting yaitu pemeratakan kesejahteraan social dan dapat terjalin hubungan yang baik antara orang kaya dan orang miskin. Ketiga, sebenarnya kemiskinan itu ada dua yaitu kemiskinan material dan kemiskinan spiritual. Yang dimaksud dengan kemiskinan material adalah miskin dari harta benda duniawi, sedangkan kemiskinan spiritual adalah kemiskinan yang tidak ada kaitannya dengan kekurangan harta benda duniawi, tetapi kekurangan terhadap iman atau jiwa (Ishom, 2021).

2.1.2 Ukuran Kemiskinan

Kemiskinan mempunyai arti yang sangat luas dan tidak mudah untuk mengukurnya. Oleh karena itu, ada 2 macam ukuran kemiskinan yang digunakan pada umumnya, yaitu sebagai berikut:

1. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang diukur dengan memperbandingkan tingkat pendapatan orang atau keluarga dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasar minimum. Dan seseorang atau keluarga itu dikatakan miskin jika pendapatannya kurang dari atau tidak mencapai pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang atau keluarga hidup secara layak. Kebutuhan pokok minimum, yaitu seperti: pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan.

Konsep ini dimaksudkan untuk penentuan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian, dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup.

2. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang lebih banyak ditentukan oleh keadaan lingkungan dimana seseorang atau keluarga itu tinggal, sehingga walaupun seseorang atau keluarga itu pendapatannya dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya, tetapi tergolong orang-orang yang berpendapatan lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat di luar lingkungannya, maka seseorang atau keluarga tersebut berada dalam keadaan miskin (Syamsuri, 2018).

2.1.3 Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan

Adapun beberapa faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kemiskinan yaitu sebagai berikut :

1. Pengangguran

Pengangguran adalah sebuah golongan Angkatan kerja yang belum melakukan suatu kegiatan yang menghasilkan uang. Pengangguran tidak terbatas pada orang yang belum bekerja. Orang yang sedang mencari pekerjaan dan orang yang bekerja namun pekerjaannya tidak produktif pun dikategorikan sebagai pengangguran.

Adapun jenis-jenis pengangguran itu dibedakan menjadi empat jenis berdasarkan keadaan yang menyebabkannya, antara lain yaitu:

a. Pengangguran Friksional

Pengangguran friksional adalah pengangguran yang disebabkan oleh sistem yang tidak bisa mempertemukan antara pembuka lowongan kerja dan pencari kerja, entah itu kendala informasi, waktu ataupun geografi.

b. Pengangguran Struktural

Pengangguran struktural adalah pengangguran yang disebabkan oleh perubahan struktur perekonomian. Contohnya peralihan perekonomian dari sektor perkebunan ke sektor industry. Masyarakat yang ingin bekerja di sektor industry sulit bekerja karena mereka terbiasa bekerja di sektor perkebunan sehingga harus menyesuaikan diri bila ingin bekerja di sektor industry.

c. Pengangguran Alamiah

Pengangguran alamiah adalah pengangguran yang berkaitan dengan keseimbangan makro ekonomi dimana tingkat inflasi yang diharapkan adalah sama dengan tingkat inflasi actual.

d. Pengangguran Konjungtural

Pengangguran konjungtural adalah pengangguran yang terjadi akibat dari merosotnya kegiatan ekonomi atau karena

terlampau kecilnya permintaan agregat di dalam perekonomian dibandingkan dengan penawaran agregat.

2. Pendidikan

Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang kurang mempunyai keterampilan tertentu yang diperlukan dalam kehidupannya. Keterbatasan pendidikan atau keterampilan yang dimiliki seseorang menyebabkan keterbatasan kemampuan seseorang untuk masuk dalam dunia kerja.

3. Malas Bekerja

Adanya sikap malas (bersikap pasif atau bersandar pada nasib) menyebabkan seseorang bersikap acuh tak acuh dan tidak bergairah untuk bekerja.

4. Keterbatasan Sumber Alam

Suatu masyarakat akan dilanda kemiskinan apabila sumber alamnya tidak lagi memberikan keuntungan bagi kehidupan mereka. Hal ini sering dikatakan masyarakat itu miskin sumber daya alamnya miskin.

5. Terbatasnya Lapangan Kerja

Keterbatasan lapangan kerja akan membawa konsekuensi kemiskinan bagi masyarakat. Secara ideal harus mampu menciptakan lapangan kerja baru sedangkan secara faktual hal tersebut sangat kecil kemungkinannya bagi masyarakat miskin karena keterbatasan modal dan keterampilan.

6. Keterbatasan Modal

Seseorang miskin sebab mereka tidak mempunyai modal untuk melengkapi alat maupun bahan dalam rangka menerapkan keterampilan yang mereka miliki dengan suatu tujuan untuk memperoleh penghasilan.

7. Beban Keluarga

Seseorang yang mempunyai anggota keluarga banyak apabila tidak diimbangi dengan usaha peningkatan pendapatan akan menimbulkan kemiskinan karena semakin banyak anggota keluarga akan semakin meningkat tuntutan atau beban untuk hidup yang harus dipenuhi (Itang, 2017).

2.1.4 Kemiskinan Menurut Ekonomi Islam

Kemiskinan bukanlah suatu permasalahan yang diinginkan oleh setiap orang, namun dalam realitas kehidupan manusia hal tersebut tetap ada. Oleh karena itu, lewat konsep sosialisme Islam atau religious, para pembela sosialisme menjelaskan bahwa Islam melarang beberapa praktek transaksi ekonomi yang dapat mengganggu keserasian atau keharmonisan hubungan antara anggota masyarakat.

Keadaan miskin sebagai salah satu hal yang tidak menyenangkan bagi manusia sesungguhnya tidak sejalan dengan kondisi ideal yang diharapkan oleh tujuan utama syariat Islam yang menghendaki agar manusia hidup sejahtera lahir dan batin, didunia dan akhirat. Gejala sosial demikian mencerminkan adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan (Arraiyah, 2017a).

Disamping itu Islam juga menetapkan bahwa dalam harta milik pribadi terdapat hak orang-orang yang butuh dan harus disalurkan kepada mereka.

Penyaluran tersebut dapat dilakukan melalui :

1. Zakat

Zakat adalah harta yang dikeluarkan oleh manusia dari hak Allah untuk fukura. Menurut M.A. Manan zakat merupakan poros dan pusat keuangan Negara Islam. Zakat meliputi bidang moral, zakat mengikis habis ketamakan orang kaya. Dalam bidang social, zakat merupakan alat khusus yang diterapkan oleh Islam untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat lewat tanggung jawab sosial orang kaya. Dalam bidang ekonomi, ia mencegah penumpukan kekayaan dalam tangan segelintir orang (Arraiyah, 2017b).

Penyaluran zakat dapat dikaji melalui ayat dalam Surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakannya) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana” (Qs At-Taubah 9 : 60).

Delapan bagian yang berhak mendapatkan zakat itu dapat dibedakan menjadi 3 kategori. Kategori pertama berkaitan dengan orang-orang yang memerlukan pertolongan meliputi orang-orang fakir, muallaf, budak, orang yang berhutang dan musafir. Kategori kedua adalah orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat. Kategori ketiga adalah bagian dari zakat yang dibelanjakan di jalan Allah (Arraiyah, 2017c).

2. Infak

Kata infak dalam berbagai bentuknya, terutama kata kerja bentuk lampau, sedang atau perintah, banyak digunakan dalam Al-Qur'an untuk menyadarkan orang-orang beriman agar menginfakkan harta yang mereka miliki. Seperti pada Surat Al-Baqarah ayat 177 yang berbunyi :

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ
بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۗ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ
الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya : “Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan

orang-orang yang meminta-minta, dan memerdakakan hamba sahaya, menunaikan shalat, dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dalam peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar (imannya), dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa” (Qs Al-Baqarah 2 : 177).

Infak berarti membelanjakan harta atau semacamnya pada jalan kebaikan, atau jalan yang diridhai Allah SWT. Adapun sasaran yang diberikan infak adalah, orang tua, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan (Hastuti, 2016).

Dalam Islam, kemiskinan disebabkan oleh beberapa hal, yaitu : *pertama*, keterbatasan untuk berusaha. Keterbatasan kesempatan untuk berusaha sebagai salah satu penyebab kemiskinan dikemukakan dalam Surat Al-Baqarah ayat 273 yang berbunyi :

لِّلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ

Artinya : “Berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah, mereka tidak dapat berusaha di bumi...” (Qs Al-Baqarah 2 : 273).

Ungkapan ayat tersebut berarti mereka tidak dapat melakukan perjalanan di atas bumi ini untuk melakukan aktivitas perdagangan dan mata pencaharian karena sakit, takut kepada musuh, ketuaan dan keadaan darurat. *Kedua*, penindasan. Dalam Al-Qur’an Surah Al-Hasyr ayat 8 yang berbunyi :

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ
اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

Artinya : “(juga) bagi orang fakir yang berhijrah yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka (karena) mencari karunia Allah dan keridhaan-Nya dan mereka menolong Allah dan RasulNya. Mereka itulah orang-orang yang benar”(Qs Al-Hasyr 59 : 8).

Ungkapan *ilfukarailmuhajirina*, menurut sebagian musafir, menunjuk kepada empat golongan manusia yang telah disebutkan dalam ayat sebelumnya, yaitu : kerabat Nabi, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan yang semuanya itu fakir dan berhijrah, sedang menurut sebagian ulama ungkapan ini menunjukkan kepada orang-orang fakir yang telah meninggalkan kampung halaman dan harta bendanya dan menanggung kesulitan ekonomi dan akibat pengusiran karena kecintaan mereka kepada Nabi Muhammad SAW. *Ketiga*, cobaan Tuhan. Allah berfirman dalam Surat Al-An'am ayat 42 yang berbunyi :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ
يَتَضَرَّعُونَ

Artinya : “dan Sesungguhnya Kami telah mengutus (rasul-rasul) kepada umat-umat sebelum kamu, kemudian Kami siksa mereka dengan (menimpakan) kesengsaraan dan kemeralatan, supaya mereka memohon (kepada Allah) dengan tunduk merendahkan diri”(Qs Al-An'am 6 : 42).

Tafsir Jalalain menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *al-ba'sa* pada ayat diatas adalah kemiskinan yang parah, *al-dharra'* berarti penyakit, dan *la'allahum yatadharra'un* berarti semoga mereka merendahkan diri lalu beriman, artinya, penderitaan yang ditimpahkan kepada umat-umat terdahulu berupa kementerian dan penyakit dimaksudkan oleh Allah agar mereka itu merendahkan diri. *Keempat*, pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah. Dahulu umat Nabi Musa mendapat nikmat dari Allah berupa jenis makanan tertentu yang diturunkan dari langit. Mereka mengeluh. Mereka mengeluh dengan satu makanan saja. Karena itu, mereka mengadu kepada Nabi Musa agar ia memohon kepada Allah untuk mendapat makanan berupa sayur-mayur, yaitu ketimun, bawang, kacang dan bawang merah. Mereka kemudian diperintahkan pergi ke suatu kota untuk memperoleh apa yang mereka minta. Mereka lalu mendapat nista, hinaan dan kemurkaan dari Allah (Arraiyah, 2017d).

2.2 Program Beras Miskin (RASKIN) Untuk Masyarakat Miskin

2.2.1 Pengertian Program Beras Miskin

Program Raskin adalah program nasional lintas sektoral baik vertikal (Pemerintah Pusat sampai dengan Pemerintah Daerah) maupun horizontal (lintas Kementerian/Lembaga), sehingga semua pihak yang terkait bertanggung jawab sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan dan pencapaian

tujuan program beras miskin. Pelaksanaan beras miskin merupakan tanggung jawab dua lembaga, yaitu Bulog dan Pemerintah Daerah (Pemda). Bulog bertanggung jawab terhadap penyaluran beras hingga titik distribusi, sedangkan Pemda bertanggung jawab terhadap penyaluran beras dari titik distribusi hingga rumah tangga sasaran.

Program Raskin termasuk dalam kelompok program kluster I yaitu Bantuan dan Perlindungan Sosial (Program Raskin, Jamkesmas, Beasiswa Miskin). Yang bertujuan untuk pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, serta perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin yang bersifat langsung dan dapat dirasakan langsung manfaatnya. Program Raskin merupakan program perlindungan sosial yang mendukung program lainnya, seperti perbaikan gizi, peningkatan kesehatan, pendidikan dan peningkatan produktivitas rumah tangga miskin (Bungkaes et al., 2013).

Raskin merupakan subsidi pangan dalam bentuk beras yang diperuntukkan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial pada rumah tangga sasaran. Keberhasilan Program Raskin diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6T, yaitu : tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi.

2.2.2 Tujuan Program Beras Miskin

Untuk terlaksana program raskin dengan baik, adapun program dari program tersebut, yaitu :

1. Tujuan mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin, melalui pemberian bantuan sebagai kebutuhan pangan dalam bentuk beras.
2. Sasaran rumah tangga miskin (RTM), di desa atau kelurahan yang berhak menerima beras miskin, sebagai hasil seleksi musyawarah desa atau kelurahan yang terdaftar, dalam daftar penerimaan manfaat (DPM), ditetapkan oleh kepala desa atau kelurahan dan di sahkan oleh camat.
3. Kriteria raskin hanya diberikan kepada rumah tangga miskin, penerima manfaat raskin hasil musyawarah desa yang terdaftar dalam daftar penerima manfaat dan diberi identitas (kartu raskin atau bentuk lain).
4. Bentuk program pembagian beras, kepada kepala rumah tangga miskin hasil musyawarah desa atau kelurahan yang terdaftar dalam penerimaan manfaat.

2.2.3 Sasaran Program Beras Miskin

Sasaran program raskin 2016 adalah berkurangnya beban pengeluaran 15.530.897 RTS dalam mencukupi kebutuhan pangan melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15 kilogram per satu rumah tangga miskin per bulan.

Indikator keberhasilan program raskin menurut Pedoman Umum (Pedum) Raskin, yaitu:

- a. Tepat sasaran penerima manfaat, raskin hanya diberikan kepada rumah tangga miskin penerima manfaat raskin hasil musyawarah desa yang terdaftar dalam daftar penerima manfaat (DPM-1), dan di beri identitas (kartu raskin atau bentuk lain).
- b. Tepat jumlah jumlah beras, raskin yang merupakan hak penerima manfaat adalah sebanyak 10 sampai 15 Kilogram RTM, per bulan sesuai dengan hasil musyawarah.
- c. Tepat harga, harga beras raskin adalah sebesar 1.600 per Kilogram netto di titik distribusi.
- d. Tepat waktu, waktu pelaksanaan distribusi beras kepada rumah tangga miskin penerima manfaat raskin sesuai dengan rencana distribusi.
- e. Tepat kualitas, kualitas beras yang dibagikan kepada rumah tangga miskin harus layak untuk dikonsumsi.
- f. Tepat administrasi, terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar dan tepat waktu.

2.2.4 Kriteria Masyarakat Penerima raskin

Dalam menentukan daftar masyarakat penerima raskin didasarkan pada data terpadu untuk program perlindungan sosial yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), adapun kriteria masyarakat penerima raskin adalah :

- a. Rumah tangga yang berpenghasilan dibawah Rp.500.000

- b. Rumah tangga yang tidak memiliki tabungan minimal Rp.1.500.000.
- c. Rumah tangga yang tidak memiliki penghasilan tetap
- d. Rumah tangga yang tidak memiliki lahan pertanian
- e. Rumah tangga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok (masyarakat yang memenuhi kebutuhan pokoknya dengan cara berhutang).
- f. Rumah tangga tidak dapat mengkonsumsi protein seperti ikan/telur/daging minimal 2 kali dalam seminggu
- g. Rumah tangga dengan kondisi perumahan masih mengontrak/numpang.
- h. Kondisi lantai rumah tanah/semen kasar
- i. Kondisi dinding bangunan tempat tinggal masyarakat geribik/gabus dsb.
- j. Sumber air sumur masih menimba atau manual
- k. Sumber penerangan tidak menggunakan listrik/ menggunakan listrik akan tetapi masih menumpang (Sumber : Badan Pusat Statistik).

2.3 Kesejahteraan Masyarakat

2.3.1 Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan adalah rasa tenang seseorang karena terpenuhinya hajat-hajat hidup lahir dan batin, kesejahteraan lahir didasarkan pada standar *universal* menyangkut kesehatan, sandang, pangan dan papan (kesejahteraan ekonomi dan sosial), sedangkan

kesejahteraan batin menyangkut persepsi yang bersifat intelektual, emosional maupun spiritual seseorang.

Menurut Anwar Abbas dalam bukunya yang berjudul *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*, “orang merasa hidupnya sejahtera apabila ia merasa senang, tidak kurang suatu apapun dalam batas yang mungkin dicapainya, jiwanya tenang lahir dan batin terpelihara, ia merasa keadilan dalam hidupnya, ia terlepas dari kemiskinan yang menyiksa dan bahaya kemiskinan yang mengancam.

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat. Menurut Sen Pressmen kesejahteraan masyarakat adalah jumlah dari pilihan yang dimiliki masyarakat dan kebebasan untuk memilih diantara pilihan-pilihan tersebut dan akan memaksimum apabila masyarakat dapat membaca, makan dan memberikan hak suaranya.

Menurut Todaro dan Stephen C. Smith, kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik meliputi :

a. Tingkat Kebutuhan Dasar

Peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan dan perlindungan.

b. Tingkat Kehidupan

Peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik dan peningkatan pendidikan.

c. Memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa

Yaitu adanya pilihan pekerjaan yang lebih baik dari masyarakat yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Menurut Jeremy Bentham, terdapat empat hal yang mendasar yang perlu diperhatikan dalam mencapai kesejahteraan, yaitu sebagai berikut:

- a. Kebahagiaan adalah satu-satunya tujuan utama yang harus dicapai oleh masyarakat dalam aktivitas ekonomi.
- b. Diberlakukan pendidikan bagi masyarakat dengan tujuan agar dapat memilih dan memilah sesuatu yang dapat meningkatkan aspek kebahagiaan dalam melakukan aktifitas ekonomi.
- c. Diberlakukan adanya rumusan undang-undang yang bertujuan untuk meningkatkan akumulasi kebahagiaan yang dirasakan oleh masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi.
- d. Diperlukan peranan pemerintah dalam sebagai aparat penegak undang-undang (hukum) yang telah disusun dalam kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam aktivitas ekonomi.

2.3.2 Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari berbagai indikator, indikator kesejahteraan merupakan suatu ukuran ketercapaian masyarakat dimana masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak. Berikut beberapa indikator-indikator

kesejahteraan masyarakat menurut beberapa organisasi sosial dan menurut beberapa ahli. Kesejahteraan masyarakat yang hanya diukur dengan indikator moneter menunjuk aspek ketidak sempurnaan ukuran kesejahteraan masyarakat karena adanya kelemahan indikator moneter. Oleh karena itu Beckkerman membedakan indikator masyarakat dalam tiga kelompok, yaitu (Badrudin, 2017):

- a. Kelompok yang berusaha membandingkan tingkat kesejahteraan di dua negara dengan memperbaiki cara perhitungan pendapatan nasional yang dipelopori Collin Clark, Gilbert dan Kravis.
- b. Kelompok yang berusaha menyusun penyesuaian pendapatan masyarakat yang dibandingkan dengan mempertimbangkan perbedaan tingkat harga di setiap Negara.
- c. Kelompok yang berusaha untuk membandingkan tingkat kesejahteraan setiap Negara berdasarkan data yang tidak bersifat moneter seperti jumlah keadaan bermotor dan konsumsi.

Gagasan lain untuk menyempurnakan indikator kesejahteraan masyarakat terus menerus dilakukan hingga muncul gagasan menggunakan *Physical Quality Of Life Indeks* (PQLI) atau *Basic Need Approach*. PQLI merupakan upaya untuk mengukur kualitas hidup atau kesejahteraan suatu negara. Nilai tersebut menggunakan rata-rata tiga statistik yaitu tingkat melek huruf dasar, kematian bayi, dan harapan hidup pada usia satu tahun.

Dalam perkembangannya, indikator kesejahteraan masyarakat PQLI belum memuaskan karena tingkat pendapatan,

kecukupan sandang, pangan dan perumahan belum dapat dijadikan indikator kesejahteraan. Untuk menyempurnakan PQLI yang belum dapat dijadikan indikator masyarakat, maka *United Nation Development Program* (UNDP) mengenalkan formula *Human Development Indeks* (HDI) atau disebut juga *Indeks Pembangunan Manusia* (IPM) pada tahun 1990, IPM dapat digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara atau daerah merupakan daerah atau negara maju, berkembang, atau terbelakang atau juga untuk mengukur pengaruh kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup. Indeks ini pada tahun 1990 dikembangkan oleh pemenang nobel India *Amartya Sen* dan *Mahbub ul Haq* seorang ekonomi Pakistan dibantu oleh *Gustav Rams* dari *Yale University* dan *Lord Megnad Desai* dari *London School of Economics*.

Adapun indikator kesejahteraan masyarakat menurut instansi pemerintah yang menangani kemasyarakatan, antara lain sebagai berikut :

a. BAPPENAS

Status kesejahteraan dapat diukur berdasarkan proporsi pengeluaran rumah tangga. Rumah tangga dapat dikategorikan sejahtera apabila proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok sebanding atau lebih rendah dari proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok lebih besar dibandingkan pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok, dapat dikategorikan sebagai rumah tangga dengan status kesejahteraan yang masih rendah.

b. Badan Pusat Statistik (BPS)

Menurut BPS ada 14 kriteria untuk menentukan keluarga atau rumah tangga miskin seperti luas bangunan, jenis lantai, dinding, fasilitas MCK, sumber penerangan, sumber air minum, jenis bahan bakar untuk memasak, frekuensi mengkonsumsi daging, susu dan ayam, frekuensi membeli pakaian dalam satu tahun, frekuensi makan setiap hari, kemampuan untuk berobat, luas lahan usaha tani, pendidikan kepala keluarga dan tabungan atau barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp. 500.000, seperti kepemilikan kendaraan motor kredit atau non kredit, emas, ternak, dan sebagainya. Jika minimal 9 variabel terpenuhi, maka dikategorikan sebagai rumah tangga miskin atau tidak sejahtera.

c. BKKBN

Menurut BKKBN ada beberapa indikator yang dipenuhi agar suatu keluarga dikategorikan sebagai keluarga yang sejahtera, yaitu : anggota keluarga melakukan ibadah sesuai dengan agama yang dianut masing-masing. Seluruh anggota keluarga pada umumnya makan dua kali sehari atau lebih, seluruh anggota keluarga mempunyai pakaian yang berbeda dirumah, sekolah, bekerja dan berpergian.

Tingkat kesejahteraan masyarakat atau taraf hidup diukur dari tingkat terpenuhinya kebutuhan pokok/dasar seperti makanan. Maka dengan adanya program Raskin ini dapat

mengurangi beban pengeluaran keluarga melalui pemberian bantuan sebagian kebutuhan pangan.

2.4 Kesejahteraan Masyarakat Menurut Ekonomi Islam

2.4.1 Pengertian Kesejahteraan (Falah) Menurut Ekonomi Islam

Al-Falah secara Bahasa bermakna *Zhafarah bima yurid* (kemenangan atas apa yang diinginkan), disebut *al-falah* artinya menang, keberuntungan dengan mendapatkan kenikmatan akhirat. Dalam pengertian liberal, *falah* adalah kemuliaan dan kemenangan, yaitu kemuliaan dan kemenangan dalam hidup.

Istilah *Falah* menurut Islam diambil dari kata-kata Al-Qur'an, yang sering dimaknai sebagai keberuntungan jangka Panjang, dunia, dan akhirat, sehingga tidak hanya memandang aspek material namun justru lebih ditekankan pada aspek spiritual. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 104 :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya : "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung" (Qs Al-Imran 3 : 104).

Berdasarkan pengertian diatas, maka *falah* bisa diartikan sebagai kebahagiaan, keberuntungan, kesuksesan, dan kesejahteraan yang dirasakan oleh seseorang, baik ia bersifat lahir dan batin, yang bisa ia rasakan di dunia dan akhirat kelak. Tidak

ada ukuran yang bisa mengukur tingkat kebahagiaan karena ia bersifat keyakinan dalam diri seseorang.

Pendefinisian Islam tentang kesejahteraan mencakup dua pengertian :

1. Kesejahteraan *holistic* dan seimbang

Yaitu kecukupan materi yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan spiritual serta mencakup individu dan sosial. Sosok manusia terdiri atas unsur fisik dan jiwa, karenanya kebahagiaan haruslah menyeluruh dan seimbang diantara keduanya. Demikian pula manusia memiliki dimensi individu sekaligus sosial. Manusia akan merasa bahagia jika terdapat keseimbangan diantara dirinya dengan lingkungan sosialnya.

2. Kesejahteraan di dunia dan akhirat

Sebab manusia tidak hanya hidup di alam dunia saja, tetapi juga di alam setelah kematian atau kemusnahan dunia (akhirat). Kecukupan materi di dunia ditunjukkan dalam rangka untuk memperoleh kecukupan di akhirat, jika kondisi ideal ini tidak dapat dicapai maka kesejahteraan di akhirat tentu lebih diutamakan, sebab ia merupakan suatu kehidupan yang abadi dan lebih bernilai dibandingkan kehidupan dunia.

Untuk kehidupan dunia, ada tiga pengertian dari falah, yaitu kelangsungan hidup, kebebasan berkeinginan, kekuatan dan kehormatan. Sedangkan untuk kehidupan akhirat, falah mencakup empat pengertian, yaitu kelangsungan hidup yang abadi, kesejahteraan yang abadi, kemuliaan abadi dan pengetahuan abadi.

Dalam Ekonomi Islam kesejahteraan yaitu terhindar dari rasa takut terhadap penindasan, kelaparan, dahaga, penyakit, kebodohan, masa depan diri, sanak saudara, bahkan lingkungan. Hal ini sesuai dengan kesejahteraan surgawi dapat dilukiskan antara lain dalam peringatan Allah SWT kepada Adam (Shihab, 2007) yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Tha ha ayat 117-119, yang berbunyi :

فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى
إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَىٰ

Artinya : "117. Maka Kami Berkata : Hai Adam, sesungguhnya ini (iblis) adalah musuh bagimu dan bagi isterimu, maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surge, yang menyebabkan kamu menjadi celaka. 118. Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang. 119. Dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya"(Qs Tha ha 20 : 117-119).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa sandang, pangan, dan papan yang diistilahkan dengan tidak lapar, dahaga, telanjang dan kepanasan semuanya telah terpenuhi disana. Terpenuhinya kebutuhan ini merupakan unsur pertama untuk kesejahteraan masyarakat. Terdapat sejumlah argumentasi baik yang bersifat teologis, normatif maupun rasional-filosofis yang menegaskan tentang ajaran Islam amat peduli untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.

Pertama, dilihat dari pengertiannya sejahtera seperti yang dikemukakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah aman, sentosa, damai, makmur dan selamat serta terlepas dari berbagai macam gangguan kesukaran dan sebagainya. Pengertian ini sejalan dengan pengertian Islam yang berarti selamat, sentosa, aman. Pengertian ini dipahami bahwa masalah kesejahteraan sosial sejalan dengan misi Islam itu sendiri. Misi inilah yang sekaligus menjadi kerasulan Nabi Muhammad SAW. Seperti yang dinyatakan dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya : "dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam" (Qs Al-Anbiya 2 : 107).

Kedua, dilihat dari segi kandungannya terlihat bahwa seluruh aspek ajaran Islam selalu terkait dengan masalah kesejahteraan sosial. Hubungan dengan Allah misalnya, harus dibarengi dengan sesama manusia (*Habl min Allah wa habl min an-nas*).

Ketiga, upaya mewujudkan kesejahteraan sosial merupakan misi kekhalfahan yang dilakukan sejak Nabi Adam as. Kesejahteraan sosial yang didambakan Al-Qur'an tercermin di surga yang dihuni oleh Adam dan istrinya sesaat sebelum mereka turun melaksanakan tugas kekhalfahan di bumi.

Keempat, didalam ajaran Islam terdapat pranata dan lembaga yang secara langsung berhubungan dengan penciptaan kesejahteraan sosial, seperti kafaf dan sebagainya. Semua bentuk lembaga sosial mencari alternatif untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Namun lembaga ini belum merata dilakukan oleh umat Islam dan belum pula efektif dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.

Kelima, ajaran Islam mengenai perlunya perwujudan kesejahteraan sosial ini selain dengan cara memberi motivasi sebagaimana tersebut diatas, juga disertai dengan petunjuk bagaimana mewujudkannya. Ajaran Islam mewujudkan dan menumbuh subur aspek-aspek kaidah dan etika pada diri pribadi yang seimbang akan lahir masyarakat yang seimbang.

Idealisasi kesejahteraan hidup dalam islam khususnya, dan agama samawi pada umumnya, adalah kehidupan surgawi yaitu kehidupan di surga nanti yang selalu digambarkan sebagai berikut (Chapra, 2000):

- a. Serba kecukupan pangan yang berkalori dan bergizi.
- b. Kecukupan sandang yang bagus-bagus.
- c. Tempat tinggal yang indah dan nyaman.
- d. Lingkungan hidup yang sehat dan segar.
- e. Hubungan sosial yang tentram, aman dan damai.
- f. Hubungan yang selalu dekat dengan Allah, Tuhan Maha Pemurah.

Kunci keberhasilan untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dan ideal itu harus melalui proses yang panjang, yaitu :

- a. Keimanan yang mantap kepada Allah dan Rasulnya, dan rukun iman lainnya. Kewajiban beriman kepada Allah itu bertujuan untuk menjadi pemegang dalam kehidupan dan dapat mengikat perasaan. Dengan demikian manusia tidak akan menyeleweng ataupun keluar dari jalan yang benar dalam perjalanan bersama yang lain.
- b. Ketekunan melakukan amal-amal shaleh baik amalan yang bersifat ritual seperti shalat, zakat, puasa dan lain-lainnya, dan amalan yang bersifat sosial seperti, pendidikan, kesehatan dan masalah-masalah kesejahteraan lainnya, maupun amalan yang bersifat kultural, yang lebih luas seperti pendayagunaan dan pelestarian budaya alam, penanggulangan bencana, penelitian dan sebagainya.
- c. Kemampuan menangkal diri dari kemaksiatan dan perbuatan yang merusak kehidupan.

Gambaran kesejahteraan “kehidupan surgawi” diidentifikasi sebagai kehidupan akhirat. Tetapi disamping kesejahteraan kehidupan surgawi tersebut. Islam juga memberikan perintah agar diupayakan terwujudnya kesejahteraan kehidupan duniawi dengan kunci keberhasilan yang tidak berbeda dengan kunci keberhasilan untuk kesejahteraan kehidupan surgawi. Orang yang memperlihatkan ajaran-ajaran Islam dengan cermat, akan

selalu mengacu pada perwujudan kemaslahatan manusia, pencapaian-pencapaian maupun kesejahteraan ukhrawi.

2.4.2 Pengertian Kesejahteraan Masyarakat Menurut Ekonomi Islam

Komitmen Islam yang demikian mendalam terhadap persaudaraan dan keadilan menyebabkan konsep kesejahteraan (falah) bagi semua umat manusia sebagai suatu tujuan pokok Islam. Kesejahteraan ini meliputi kepuasan fisik sebab kedamaian mental dan kebahagiaan hanya dapat dicapai melalui realisasi yang seimbang antara kebutuhan materi dan rohani dari personalitas manusia (Cipta, 2019).

Berikut ini ayat yang menerangkan hubungan manusia dan sosial kaum Mukmin di dunia yang berlandaskan pada keadilan, kebaikan dan menauh dari segala kezaliman dan arogansi, yaitu pada QS. An-Nahl ayat 90, yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : “sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran” (Qs An-Nahl 16 : 90).

Islam menekankan bahwa manusia adalah makhluk sosial, dan karena itu dia dapat mengembangkan kepribadiannya hanya dalam masyarakat. Shalat lima kali sehari dalam Islam adalah wajib

dalam jama'ah, sedemikian pula pergi ziarah haji ke Mekkah waib bagi yang mampu. Orang Islam diwajibkan untuk shalat lima kali sehari tetapi juga diberitahukan melaksanakan perdagangan (usaha) mereka dan berdagang setelah shalat. Islam mengakui kesejahteraan individu dan kesejahteraan sosial masyarakat yang saling melengkapi satu dengan lain, bukannya saling bersaing dan bertentangan antar mereka.

Bersumber dari pandangan hidup Islam melahirkan nilai-nilai dasar dalam ekonomi yaitu (Urif & Aulia, 2019):

- a. Keadilan, dengan menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian dan konsisten pada kebenaran.
- b. Pertanggungjawaban, untuk memakmurkan bumi dan alam semesta sebagai tugas seorang khalifah. Setiap pelaku ekonomi memiliki tanggung jawab untuk berperilaku ekonomi yang benar, amanah dalam mewujudkan kemaslahatan. Juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum bukan kesejahteraan pribadi atau kelompok tertentu saja.
- c. Tafakul (jaminan sosial), adanya jaminan sosial dimasyarakatkan akan mendorong terciptanya hubungan yang baik diantara individu dan masyarakat, karena Islam tidak hanya mengajarkan hubungan vertikal, namun juga menempatkan hubungan horizontal ini secara seimbang.

Kepatuhan ini membantu manusia merealisasikan potensi dirinya, dengan berusaha semaksimal mungkin untuk

mengembangkan diri dalam menciptakan kesejahteraan. Kesejahteraan yang bukan untuk kepentingan pribadi namun kesejahteraan bagi seluruh umat manusia.

Kesejahteraan dalam pandangan Islam tidak hanya dinilai dari ukuran material saja, tetapi dinilai juga ukuran non-material seperti : terpenuhinya kebutuhan spiritual, terpeliharanya nilai-nilai moral dan terwujudnya keharmonisan sosial (Noor, 2013).

Imam Ghazali mendefinisikan aspek dari fungsi kesejahteraan sosialnya dalam rangka sebuah hirarki utilitas individu dan sosial yang *tripartite* meliputi : kebutuhan pokok (*dharuriyyat*), kesenangan atau kenyamanan (*hajiyyat*), dan kemewahan (*tahsiniyyat*).

a. Prioritas utama

Ad-Dharuriyyat ialah kebutuhan pokok, yakni kebutuhan pangan, sandang, perumahan atau papan dan semua kebutuhan pokok yang tidak dapat dinilai dari kehidupan minimum. *Dharuriyyat* merupakan tujuan yang harus ada dan mendasar bagi penciptaan kesejahteraan di dunia dan akhirat, yakni mencakup terpeliharanya lima elemen dasar kehidupan yakni jiwa, keyakinan atau agama, akal atau intelektual, keturunan dan keluarga serta harta benda. Jika tujuan *dharuriyyat* diabaikan, maka tidak ada nada kedamaian, yang timbul adalah kerusakan (*fasad*) didunia dan kerugian yang nyata di akhirat.

b. Prioritas kedua

Al-Hajiyat ialah kebutuhan-kebutuhan yang wajar, seperti kebutuhan penerangan, kebutuhan pendidikan, dan lain sebagainya. kebutuhan sekunder, yakni kebutuhan manusia untuk memudahkan kehidupan, agar terhindar dari kesulitan. Kebutuhan ini tidak perlu dipenuhi sebelum kebutuhan primer terpenuhi. Kebutuhan inipun masih berkaitan dengan lima tujuan syari'at. Syari'ah bertujuan memudahkan kehidupan dan menghilangkan kesempitan. Hukum syara' dalam kategori ini tidak dimaksudkan untuk memelihara lima hal pokok tadi melainkan menghilangkan kesempitan dan berhati-hati terhadap lima hal pokok tersebut.

c. Prioritas ketiga

Tahsiniyat atau dapat disebut juga kesempurnaan yang lebih berfungsi sebagai kesenangan akhirat dari pada kesenangan hidup. Kebutuhan pelengkap, yaitu kebutuhan yang dapat menciptakan kebaikan dan kesejahteraan dalam kehidupan manusia. Pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder serta berkaitan dengan lima tujuan syariat. Syari'ah menghendaki kehidupan yang indah dan nyaman didalamnya. Terdapat beberapa provinsi dalam syari'ah yang dimaksud untuk mencapai pemanfaatan yang lebih baik, keindahan dan simplikasi dari dharuriyah dan hajiyah.

Agar kesejahteraan di masyarakat dapat terwujud, pemerintah berperan dalam mencukupi kebutuhan masyarakat, baik dasar/primer, sekunder (*the need/haji*), maupun tersier (*the commendable/tahsini*), dan pelengkap (*the luxury/kamili*). Disebabkan hal tersebut, pemerintah dilarang untuk berhenti pada pemenuhan kebutuhan dan pelayanan primer masyarakat saja, namun harus berusaha untuk mencukupi keseluruhan kebutuhan komplemen lainnya, selama tidak bertentangan dengan syari'ah sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang sejahtera.

Oleh karena itu, tujuan dari sistem ekonomi Islam tidak bisa terlepas dari tujuan syari'ah, yang menurut *As-Syatibi* adalah untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh manusia, yang terletak pada terlindungnya keimanan (*ad-din*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-aql*), keturunan (*an-nasl*), dan kekayaan (*al-mal*) (Karim, 2012). Imam Ghazali berpendapat bahwa yang jelas masuk dalam kategori *ad-dharuriyyat* yang menjadi prioritas Garapan Islam yang menjaga kemaslahatan, yaitu :

1. Agama atau keimanan (*Ad-din*), merupakan sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dari peribadatan kepada Tuhan yang maha kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia serta lingkungannya.
2. Jiwa (*An-nafs*), seluruh kehidupan batin manusia yang terjadi dari perasaan, pikiran, angan-angan dan sebagainya.
3. Akal (*Al-aql*), kemampuan daya piker, memahami dan menganalisis.

4. Keturunan (*An-nasl*), kumpulan manusia yang dihubungkan melalui pertalian darah, perkawinan, atau pengambilan anak angkat.
5. Kekayaan (*Al-mal*), merupakan sesuatu yang dapat dihimpun, disimpan, dipelihara dan dapat dimanfaatkan menurut adat dan kebiasaan.

Tujuan syari'ah akan menjiwai manusia untuk bertindak baik bagi dirinya maupun lingkungannya sekitarnya. Keimanan, terletak pada urutan pertama tak lain karena keimanan akan memberikan pandang terhadap dunia yang dapat mempengaruhi kepribadian dan sikap mental seseorang. Seperti misalnya, perilaku, gaya hidup, selera, sikap terhadap manusia dan lingkungan sekitarnya. Sikap mental tersebut, secara ekonomi akan mempengaruhi sifat, kualitas, kuantitas kebutuhan material dan cara pemenuhan kebutuhannya.

Jiwa, akal dan keturunan ditempatkan pada urutan selanjutnya karena ia berhubungan dengan manusia itu sendiri, yang mencakup kebutuhan fisik, moral dan psikologi (mental). Memelihara jiwa sebagai tujuan syari'ah, dalam sudut pandang ekonomi mempengaruhi alokasi dan distribusi sumber daya. Dilakukan dengan menciptakan sumber daya manusia yang berjiwa tangguh, dan mempunyai visi jauh kedepan, bukan hanya untuk mencari keuntungan saat ini, namun juga untuk generasi-generasi yang akan datang. Perlindungan terhadap akal diharapkan akan terciptakan kondisi mental dan materi yang mampu memberikan

kontribusi bagi kemajuan intelektual, pendidikan dan teknologi. Kemajuan yang mampu dicapai pada akhirnya akan memberikan kemanfaatan bagi kesejahteraan masyarakat.

Menjaga keturunan merupakan hal utama setelah jiwa dan akal. Keberlangsungan hidup keturunan sebagai penerus generasi merupakan asset SDM untuk masa yang akan datang. Pengelolaan SDM yang baik, akan menjadikan manusia yang mampu menciptakan hal-hal yang inovatif dan kreatif, sehingga mampu memberikan dampak positif yang luas di masyarakat. Perlindungan terhadap kekayaan pada urutan terakhir dari tujuan syari'ah, ini lebih dikarenakan kekayaan bukan merupakan unsur utama dalam mewujudkan kesejahteraan semua manusia secara adil.

2.4.3 Indikator Kesejahteraan Menurut Ekonomi Islam

Pertumbuhan ekonomi merupakan sarana untuk mencapai keadilan distributive, karena mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang baru, dengan terciptanya lapangan kerja baru maka pendapatan riil masyarakat akan meningkat, dan ini merupakan salah satu indikator kesejahteraan dalam ekonomi Islam, tingkat pengangguran yang tinggi merupakan masalah yang memerlukan perhatian serius seperti halnya dalam ekonomi kapitalis, hanya saja dalam pemikiran liberal, tingkat pengangguran yang tinggi bukan merupakan indikator kegagalan sistem ekonomi kapitalis yang didasarkan pada pasar bebas, hal itu dianggap sebagai proses tradisional, sehingga problem itu dipandang akan hilang begitu pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan (Naqvi, 2003).

Al-Qur'an telah menyinggung indikator kesejahteraan dalam surat Quraisy ayat 3-4, yang berbunyi:

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ
مِنْ خَوْفٍ

Artinya : “Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka’bah), yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan” (Qs Quraisy 106 : 3-4).

Berdasarkan ayat di atas, maka kita dapat melihat bahwa indikator kesejahteraan dalam al-Qur'an ada tiga, yaitu menyembah Tuhan (pemilik) Ka’bah, menghilangkan lapar, menghilangkan rasa takut (Sodiq, 2015a).

Indikator *pertama*, untuk kesejahteraan adalah ketergantungan penuh manusia kepada Tuhan pemilik Ka’bah, yaitu Allah SWT, indikator ini merupakan representasi dari pembangunan mental, hal ini menunjukkan bahwa jika seluruh indikator kesejahteraan yang berpijak pada aspek materi telah terpenuhi, hal itu tidak menjamin bahwa pemiliknya akan mengalami kebahagiaan, kita sering mendengar jika ada orang yang memiliki rumah mewah, kendaraan banyak, harta yang melimpah namun hatinya selalu gelisah dan tidak pernah tenang bahkan sedikit yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, padahal seluruh kebutuhannya telah terpenuhi. Karena itulah ketergantungan manusia kepada Tuhannya yang diaplikasikan

dalam penghambaan (ibadah) kepada-Nya secara ikhlas merupakan indikator utama kesejahteraan (kebahagiaan yang hakiki) seseorang sebagaimana dialami oleh penduduk Bhutan, Negara yang memiliki indeks kebahagiaan tertinggi dan merupakan negara paling aman di dunia.

Indikator *kedua*, adalah hilangnya rasa lapar (terpenuhinya kebutuhan konsumsi), ayat di atas menyebutkan bahwa dialah Allah yang memberi mereka makan untuk menghilangkan rasa lapar, statemen tersebut menunjukkan bahwa dalam ekonomi Islam terpenuhinya kebutuhan konsumsi manusia yang merupakan salah satu indikator kesejahteraan hendaknya bersifat secukupnya (hanya untuk menghilangkan rasa lapar) dan tidak boleh berlebih-lebihan apalagi sampai melakukan penimbunan demi mengeruk kekayaan yang maksimal, terlebih lagi jika harus menggunakan cara-cara yang dilarang oleh agama, tentu hal ini tidak sesuai anjuran Allah dalam surat Quraisy di atas, jika hal itu bisa dipenuhi, maka kita tidak akan menyaksikan adanya korupsi, penipuan, pemerasan, dan bentuk-bentuk kejahatan lainnya.

Sedangkan indikator yang *ketiga* adalah hilangnya rasa takut, yang merupakan representasi dari terciptanya rasa aman, nyaman, dan damai. Jika berbagai macam kriminalitas seperti perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, pencurian, dan kejahatan-kejahatan lain banyak terjadi di tengah masyarakat, hal itu menunjukkan bahwa masyarakat tidak mendapatkan

ketenangan, kenyamanan dan kedamaian dalam kehidupan, atau dengan kata lain masyarakat belum mendapatkan kesejahteraan.

Ayat lain yang menjadi rujukan bagi kesejahteraan terdapat dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 9, yang berbunyi :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya : “hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka, oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar” (Qs An-Nisa' 4 : 9).

Berpijak pada ayat di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa kekhawatiran terhadap generasi yang lemah adalah representasi dari kemiskinan, yang merupakan lawan dari kesejahteraan, ayat tersebut menganjurkan kepada manusia untuk menghindari kemiskinan dengan bekerja keras sebagai wujud ikhtiyar dan bertawakkal kepada Allah, sebagaimana hadist Rasulullah SAW, yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi “*Sesungguhnya Allah menyukai seseorang yang melakukan amal perbuatan atau pekerjaan dengan tekun dan sungguh-sungguh (professional)*” (Sodiq, 2015b).

Pada ayat diatas, Allah juga menganjurkan manusia untuk memperhatikan generasi penerusnya (anak keturunannya) agar tidak terjatuh dalam kondisi kemiskinan, hal itu bisa dilakukan

dengan mempersiapkan atau mendidik penerusnya (anak keturunannya) dengan pendidikan yang berkualitas dan berorientasi pada kesejahteraan moral dan material, sehingga kelak menjadi SDM yang terampil dan berakhlakul karimah, mengingat anak adalah asset yang termahal bagi orang tua (Sukmasari, 2020).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan dapat diperoleh dengan membentuk mental menjadi mental yang hanya bergantung kepada sang Khalik (bertaqwa kepada Allah SWT), dan juga berbicara dengan jujur dan benar, serta Allah SWT juga menganjurkan untuk menyiapkan generasi penerus yang kuat, baik kuat dalam hal ketaqwaannya kepada Allah SWT maupun kuat dalam hal ekonomi.

2.5 Penelitian Terkait

Sebelum mengadakan penelitian lebih lanjut, maka langkah yang ditempu adalah mengkaji penelitian terdahulu. Maksud pengkajian ini adalah untuk mengetahui apa yang diteliti sekarang tidak sama dengan penelitian terdahulu. Oleh sebab itu untuk, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti plagiasi, maka penulis mempertegaskan perbedaan antara masing-masing penelitian yang akan dibahas yaitu sebagai berikut :

1. Peneliti Patriko Tri Budiawan (2020) tentang analisis program raskin dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat perspektif ekonomi Islam (studi pada Kecamatan Semidang Gumay). Persamaan penelitian ini dengan dengan peneliti yaitu sama-sama ingin mengkaji bagaimana kesejahteraan masyarakat

dengan adanya program beras miskin menurut perspektif ekonomi islam.

2. Penelitian Miki Tri Astutik (2019) tentang implementasi distribusi beras miskin dalam prinsip keadilan ekonomi Islam (studi kasus di desa kepuh Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk). Persamaan penilitan ini dengan peneliti yaitu ingin mengetahui bagaimana implementasi program beras miskin menurut ekonomi Islam. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian Miki Tri Astutik fokus terhadap keadilan dalam implementasi beras miskin, sedangkan peneliti ingin menganalisis dampak program beras miskin terhadap kesejahteraan masyarakat miskin.
3. Penelitian Ika Irmayanti (2018) tentang sistem pendistribusian beras miskin dalam perspektif ekonomi Islam (studi kasus masyarakat Desa Tinggimae Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa). Persamaan penelitian dan peneliti yaitu sama-sama ingin mengetahui bagaimana proses pendistribusian beras miskin dalam pandangan ekonomi Islam. Sedangkan perbedaannya yaitu peneliti tidak hanya mengkaji dari segi pelaksanaan menurut pandangan Islam, tetapi juga ingin mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat miskin dengan adanya program beras miskin.
4. Peneliti Rahmin Rahim (2016) tentang kebijakan pemerintah dan penanganan kemiskinan (studi tentang implementasi program beras miskin di Kelurahan Romang Polong Kecamatan

Somba Opu Kabupaten Gowa). Persamaan penelitian ini dan peneliti yaitu sama-sama ingin mengkaji mengenai implementasi program beras miskin. Sedangkan perbedaannya yaitu peneliti Rahmin Rahim menganalisis kebijakan pemerintah dan penanganan kemiskinan melalui program miskin.

5. Peneliti Anjar Cahyono (2015) tentang implementasi program beras miskin (raskin) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat rumah tangga miskin Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang. Persamaan penelitian ini dengan peneliti yaitu ingin mengetahui bagaimana kesejahteraan masyarakat dengan adanya program beras miskin. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini tidak mengkaji dari segi ekonomi Islam.
6. Peneliti Aswardi (2014) tentang implementasi program beras miskin di Kecamatan Tanete Riattang barat Kabupaten Bone. Persamaan penelitian ini dengan peneliti yaitu ingin mengetahui proses distribusi beras miskin. Sedangkan perbedaannya yaitu, peneliti Aswardi hanya ingin mengkaji bagaimana implementasi program beras miskin saja, tetapi peneliti ingin mengkaji mengenai implementasi program beras miskin dan juga membahas bagaimana implementasi program beras miskin dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin menurut ekonomi Islam.

Tabel 2.1 Penelitian Terkait

Nama dan Tahun	Judul	Metode dan Hasil Penelitian
Patriko Tri Budiawan (2020)	Analisis program raskin dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat perspektif ekonomi islam (studi pada Kecamatan Semidang Gumay).	Menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program beras miskin sudah sesuai dan juga masyarakat di Kecamatan Semidang Gumay telah dikatakan sejahtera, karena sudah memenuhi kebutuhan anggotanya baik kebutuhan sandang, pangan, perumahan, sosial maupun agama.
Miki Tri Astutik (2019)	Implementasi distribusi beras miskin dalam prinsip keadilan ekonomi islam (studi kasus di desa kepuh Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk)	.menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian mengatakan bahwa pendistribusian beras miskin dilakukan secara adil kepada masyarakat yang berpendapatan rendah, namun penerima beras miskin masih dikenakan biaya dalam pengambilan beras.
Ika Irmayanti (2018)	Sistem pendistribusian beras miskin dalam perspektif ekonomi islam (studi kasus masyarakat Desa Tinggimae Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa).	Menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendistribusian beras miskin tidak sesuai dalam perspektif islam karena terdapat ketidakadilan dan pemerataan beras miskin kepada masyarakat kurang mampu (miskin).

Tabel 2.1 Lanjutan

<p>Rahmin Rahim (2016)</p>	<p>Kebijakan pemerintah dan penanganan kemiskinan (studi tentang implementasi program raskin di Kelurahan Romang Polong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa</p>	<p>Menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program belum sesuai, pembagian beras miskin tidak tepat waktu, penetapan nama-nama penerima manfaat tidak sesuai, kurangnya koordinasi antara pihak penyelenggara pelaksanaan distribusi raskin, dan kurangnya pengawasan dari pejabat yang berwenang terhadap proses penyaluran Raskin</p>
<p>Anjar Cahyono (2015)</p>	<p>Implementasi program beras miskin (raskin) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat rumah tangga miskin Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang</p>	<p>Menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program beras miskin belum berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu tidak tepat sasaran, harga yang tidak sesuai dengan perencanaan awal, kemudian keterlambatan dalam penyaluran raskin.</p>
<p>Aswardi (2014)</p>	<p>Implementasi program beras miskin di Kecamatan Tanete Riattang barat Kabupaten Bone.</p>	<p>Menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian mengantarkan bahwa implemetasi program beras miskin belum berjalan sesuai harapan dikarenakan kurangnya antusiasme warga setempat serta kurangnya peran baik dari Perum BULOG.</p>

2.6 Kerangka Pemikiran

Muhammad (2008:75) menyatakan bahwa kerangka pikir adalah gambaran tentang hubungan antar variable dalam suatu penelitian. Kerangka pikir diuraikan oleh jalan pikiran menurut kerangka yang logis. Di dalam kerangka pikir inilah akan didudukkan masalah penelitian yang telah diidentifikasi dalam kerangka teoritis yang relevan, yang mampu menangkap, menerangkan, dan menunjuk perspektif dengan masalah penelitian. Kerangka penelitian digunakan untuk menunjukkan arah bagi suatu penelitian agar dapat berjalan pada lingkup yang telah ditetapkan.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu (Zuriah, 2007). Penelitian deskriptif pada umumnya merupakan penelitian non hipotesis ,yang memberikan gambaran secara lengkap dan jelas aats keadaan atau fenomena yang terjadi. Adapun pendekatan penelitian ini adalah kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan secara mengkaji gejala-gejala sosial dari suatu kasus dengan cara menganalisisnya secara mendalam di lingkungan masyarakat tertentu, baik di lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan, maupun lembaga pemerintahan. Peneliti bermaksud untuk meneliti fenomena implementasi Raskin dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di daerah Keumala, selanjutnya peneliti akan menganalisis fenomena tersebut terkait dengan ekonomi Islam.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana peneliti akan melakukan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian di Gampong Paloh Teungoh, Kecamatan Keumala, Kabupaten Pidie.

3.3 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Desa (Keuchik), pengurus Raskin dan masyarakat penerima raskin di Desa Paloh Teungoh Kecamatan Keumala Kabupaten Pidie. Sementara objek dalam penelitian ini adalah implementasi program beras miskin dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif Islam di Desa Paloh Teungoh Kecamatan Keumala Kabupaten Pidie.

3.4 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada dua jenis sumber data yaitu:

1. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan seperti hasil wawancara yang biasa dilakukan oleh peneliti yaitu dengan aparat gampong serta masyarakat gampong Paloh Teungoh, Kabupaten Pidie khususnya pelaksana distribusi serta penerima beras bersubsidi (Raskin).

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang telah di olah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain. Adapun dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah buku panduan raskin, artikel dan jurnal terkait implementasi program beras miskin.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara yaitu bentuk komunikasi langsung yang berupa tanya jawab oleh pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti (Soewadji, 2012). Pada penelitian ini, teknik wawancara yang digunakan adalah dengan cara bertanya langsung kepada pihak yang terdalem pendistribusian subsidi Raskin yakni aparatur desa (kepala desa dan kepala dusun), pelaksana distribusi beras bersubsidi (Raskin), serta masyarakat penerima subsidi Raskin di Gampong Paloh Teungoh yang berjumlah 10 orang.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah teknik wawancara berstruktur ialah tidak berstandar yang mengajukan pola dan aturan tertentu dalam mengajukan pertanyaan. (Fathoni, 2006:109).

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Metode observasi digunakan untuk membuktikan data yang diperoleh selama penelitian dengan menerapkan metode observasi nonpartisipan, dimana penulis berlaku sebagai pengamat dan tidak ambil bagian dalam aktifitas yang dilaksanakan (Sutrisno dan Hadi, 2004). Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung, hal

ini dilakukan untuk mengetahui secara pasti bagaimana Implementasi Program Beras Miskin dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Keumala menurut Ekonomi Islam.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan yang bisa berupa tulisan, gambar atau karya dokumentasi dari seseorang (Sugiyono, 2012:137). Teknik pengumpulan data dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih actual dan sesuai dengan masalah penelitian. Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi.

3.6 Teknik Analisis Data

Setelah semua data terkumpul secara lengkap, langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh peneliti adalah melaksanakan analisis data. Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif. dalam analisisnya deskriptif kualitatif tidak menggunakan kalkulasi angka dan juga tidak membuat prediksi, sebagaimana sesuai dengan paradigmanya yang *non positivistic*.

Pengelolaan dan analisis data dalam penelitian ini, sebagaimana yang telah dijelaskan melalui beberapa tahapan berikut:

1. Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2012:339) reduksi data merupakan proses berfikir sensitive yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Reduksi data yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan diskusi dengan orang-orang yang peneliti anggap mampu memberikan masukan kepada peneliti. Dari hasil diskusi tersebut, peneliti mampu untuk mereduksikan data-data dari hasil penelitian.

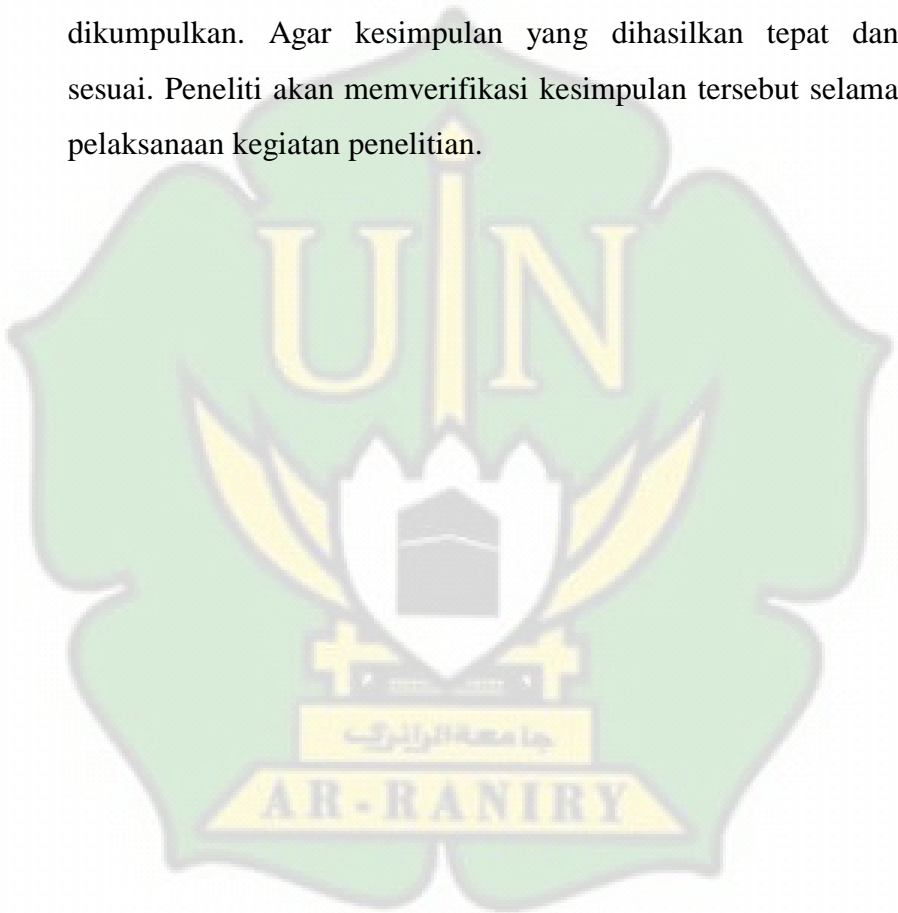
2. *Display* Data (Penyajian Data)

Setelah data di reduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya (Sugiyono, 2013:341). Penyajian data dalam penelitian ini adalah dengan cara mendeskripsikan semua kegiatan selama proses berlangsungnya kegiatan penelitian yang peneliti lakukan selama berada di lapangan penyajian data yang digunakan oleh peneliti adalah dalam bentuk uraian dan gambaran-gambaran baik dari proses maupun hasil penelitian.

3. Kesimpulan/verifikasi

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012:99) penarikan kesimpulan adalah langkah ketiga dalam analisis data kualitatif. Jadi dalam penelitian kualitatif penarikan kesimpulan dilakukan untuk menjawab rumusan masalah sementara, jika

kemudian ditemukan data-data lain yang mendukung maka kesimpulan dalam penelitian ini pun akan dinyatakan dalam bentuk kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi tersebut berupa makna atau arti yang penulis olah dari data-data yang telah dikumpulkan. Agar kesimpulan yang dihasilkan tepat dan sesuai. Peneliti akan memverifikasi kesimpulan tersebut selama pelaksanaan kegiatan penelitian.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Keadaan Geografis Desa Paloh Teungoh

Desa Paloh Teungoh merupakan salah satu desa yang berada dalam kemukiman Keumala Kecamatan Keumala Kabupaten Pidie. Untuk mengetahui secara jelas kondisi geografis Desa Paloh Teungoh, maka disajikan batas-batas Desa sebagai berikut :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Paloh Naleung
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Asan Nichah
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Pulo Loih
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Pulo Pante

Luas wilayah Desa Paloh Teungoh adalah 8000m². Desa Paloh Teungoh juga terdiri dari tiga dusun, yaitu :

- a. Dusun Tempeun
- b. Dusun Teungoh
- c. Dusun Pulo

4.1.2 Keadaan Demografis Desa Paloh Teungoh

- a. Jumlah Penduduk

Keadaan Penduduk merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang pembangunan desa. Berdasarkan data yang diperoleh dari pendataan masyarakat Desa pada tahun 2021, menunjukkan bahwa jumlah penduduk Desa Paloh Teungoh yaitu

sebanyak 234 Kartu Keluarga (KK) dengan jumlah penduduk 821 jiwa yang terdiri dari 391 laki-laki dan 430 perempuan. Untuk lebih jelasnya dipaparkan dalam tabel berikut.

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk di Desa Paloh Teungoh

No	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
1	Laki-laki	391
2	Perempuan	430

Sumber: BPS Pidie, 2022

b. Kondisi ekonomi

Sektor pertanian merupakan salah satu mata pencaharian masyarakat Desa Paloh Teungoh pada umumnya. Selain sektor pertanian, ada juga mata pencaharian masyarakat dibidang lainnya, seperti dalam berikut.

Tabel 4.2 Jenis Mata Pencaharian Masyarakat di Desa Paloh Teungoh

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	130 jiwa
2	Polri	6 jiwa
3	Pegawai swasta	8 jiwa
4	Pedagang	7 jiwa
5	Pegawai negeri sipil	61 jiwa
6	Lain-lain	-

Sumber: Kantor Desa Paloh Teungoh, 2022

c. Agama

Dari segi agama, keseluruhan penduduk di Desa Paloh Teungoh hanya memiliki satu kepercayaan yaitu hanya memeluk agama Islam atau dengan kata lain 100% penduduk Desa Paloh Teungoh beragama Islam.

4.2 Implementasi Program Beras Miskin dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Paloh Teungoh

Beras miskin merupakan subsidi pangan dalam bentuk beras yang diperuntukkan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial pada rumah tangga sasaran. Keberhasilan program beras miskin dapat diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6T.

1. Tepat Sasaran

Program beras untuk masyarakat miskin di Desa Paloh Teungoh merupakan salah satu bentuk penanggulangan kemiskinan bagi masyarakat miskin yang diberikan oleh pemerintah. Mekanisme pembagian beras miskin di Desa Paloh Teungoh berpatokan dengan Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang telah terdaftar sebagai penerima program beras miskin saja yaitu rincian perdesun sebagai berikut:

Tabel 4.5
RTS-PM di Desa Paloh Teungoh

No	Nama Dusun	Jumlah
1	Dusun Tempeun	16 KK
2	Dusun Teungoh	31 KK
3	Dusun Pulo	22 KK

Sumber: Kantor Desa Paloh Teungoh

Mekanisme pembagian beras miskin di Desa Paloh Teungoh belum menerapkan prinsip keadilan, karena masih ada rumah tangga yang kurang mampu tidak terdaftar dalam Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) sedangkan keluarga yang tergolong mampu termasuk ke dalam penerima manfaat.

Berdasarkan hasil pernyataan dari seluruh responden yang diwawancarai menyatakan bahwa: *"pembagian beras miskin tidak hanya dibagikan kepada masyarakat miskin yang berpendapatan rendah saja, bahkan ada beberapa masyarakat yang termasuk dalam kategori penerima beras miskin tetapi tidak terdaftar dalam Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM)".* Salah satunya wawancara dengan ibu Maryam pada tanggal 08 Mei 2022 beliau mengatakan : *"pembagian beras miskin belum tepat sasaran karena beberapa masyarakat yang tergolong mampu mendapatkan beras subsidi tersebut, namun ada masyarakat yang berpendapatan rendah tidak mendapatkan beras miskin".*

Hal ini jelas tidak sesuai dengan aturan penyaluran beras miskin dalam Pedum Raskin. Berdasarkan Pedum Raskin bahwa

Rumah Tangga Sasaran yaitu berpenghasilan di bawah Rp 500.000 dan rumah tangga yang tidak memiliki penghasilan tetap.

2. Tepat Jumlah

Indikator tepat jumlah yaitu jumlah yang diberikan kepada Rumah Tangga Sasaran sebesar 10-15 kg untuk setiap Kepala Keluarga. Jumlah beras subsidi yang dibagikan kepada masyarakat di Desa Paloh Teungoh sudah sesuai dengan aturan Pedum Raskin. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Mariana pada tanggal 08 Mei 2022, beliau mengatakan bahwa: *"jumlah beras yang dibagikan sudah sangat sesuai yaitu sebesar 10-15kg"*.

3. Tepat Harga

Indikator tepat harga adalah harga beras miskin yang diberikan di setiap kelurahan atau daerah sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu Rp 1.600/kg. namun jika terdapat biaya distribusi dalam penyaluran beras, harga beras dapat berbeda tergantung dari kesepakatan pelaksana distribusi ditingkat kelurahan dengan masyarakat penerima manfaat.

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan, harga beras yang harus dibayarkan oleh Rumah Tangga Sasaran yaitu sebesar Rp 1.600/kg. Menurut Ibu Ramlah *"salah satu penerima beras miskin bahwasanya beras miskin ditebus dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada biaya penambahan lain"* (Wawancara dengan ibu Ramlah, 08 Mei 2022).

4. Tepat Waktu

Indikator tepat waktu adalah pendistribusian beras miskin kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) sesuai dengan waktu yang telah ditentukan yaitu sekali dalam sebulan. Namun penyaluran beras miskin di Desa Paloh Teungoh terdapat kendala karena tidak menentunya waktu penyaluran ke desa sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, dalam praktiknya distribusi beras miskin yang terjadi di Desa Paloh Teungoh disalurkan 2 kali dalam sebulan bahkan 3 kali dalam sebulan. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Nurjannah pada 08 Mei 2022 :*”Waktu pembagian beras miskin masih tidak menentu, yang mana beras miskin tersebut tidak dibagikan setiap bulan sekali”*. Hal ini juga serupa dengan yang diutarakan oleh Ibu Jamaliah, bahwa: *“Beras miskin tidak hanya disalurkan sebulan sekali tetapi ada yang 2 bulan sekali bahkan sampai 3 bulan sekali”* (Wawancara dengan Ibu Jamaliah, 08 Mei 2022).

Berdasarkan indikator tepat waktu, dominan responden yang peneliti wawancarai menyatakan bahwa waktu pendistribusian tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Maka peneliti menyimpulkan bahwa indikator keberhasilan program beras miskin dari segi tepat waktu belum terlaksana dengan baik dikarenakan waktu penyalurannya tidak efisien sehingga tidak berjalan sesuai dengan aturan Pedum Raskin.

5. Tepat Kualitas

Indikator tepat kualitas adalah beras miskin yang dibagikan itu baik dan layak untuk dikonsumsi. Berdasarkan Pedum Raskin, beras subsidi adalah beras berkualitas baik. Dikatakan tepat kualitas apabila pembagian beras sudah terpenuhinya persyaratan kualitas yang sesuai dengan kualitas beras BULOG. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Eva pada 10 Mei 2022, beliau mengatakan bahwa :”*beras miskin yang diterima sudah layak untuk dikonsumsi*”. Begitupun pernyataan dari Ibu Hayatun yang mengatakan bahwa: “*beras yang diterima sudah cukup bagus, tidak berwarna dan masih layak untuk dikonsumsi*” (Wawancara dengan Ibu Hayatun, 10 Mei 2022).

Dengan demikian, maka indikator tepat kualitas di Desa Paloh Teungoh sudah berjalan sesuai dengan Pedum.

6. Tepat Administrasi

Berdasarkan hasil di lapangan, responden mengatakan tidak ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam penerimaan beras miskin.

Dengan demikian hal tersebut dapat dikatakan bahwa indikator tepat administrasi di Desa Paloh Teungoh belum terlaksana dengan baik, karena masyarakat penerima manfaat tidak memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi oleh rumah tangga sasaran.

Berdasarkan indikator 6T, implementasi program beras miskin di Desa Paloh Teungoh dapat dikatakan belum terlaksana dengan baik, karena adanya ketidak tepatan sasaran yang belum terpenuhi sesuai dengan Pedum Raskin. Ketidak tepatan sasaran dalam hal ini yang diperoleh oleh peneliti menunjukkan bahwa adanya rumah tangga kurang mampu yang tidak mendapatkan beras subsidi dari pemerintah, dan ada masyarakat yang tergolong mampu masih mendapatkan beras subsidi tersebut. Karena sebagian dari penerima bantuan beras miskin masyarakat yang keadaan perekonomiannya cukup baik dan memiliki lahan pertanian, mereka masih dapat memenuhi segala kebutuhan di dalam keluarga mereka dengan mengandalkan pendapatan dari hasil panen untuk beberapa bulan kedepan.

Berdasarkan hasil lapangan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program beras miskin di Desa Paloh Teungoh belum memenuhi indikator 6T. karena hanya 3 program saja yang sudah terlaksana dengan baik yaitu ketepatan harga, jumlah dan kualitas. Sedangkan untuk tercapainya kesuksesan atau keberhasilan yaitu harus terpenuhi indikator tersebut.

Manfaat program beras miskin salah satunya untuk meningkatkan ketahanan pangan sekaligus perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, sehingga diharapkan program beras miskin benar-benar memberikan manfaat pada sasaran yang tepat. Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi masyarakat yang

menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik.

4.3 Implementasi Program Beras Miskin dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Paloh Teungoh Menurut Ekonomi Islam

Berkaitan dengan implementasi program beras miskin di Desa Paloh Teungoh sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya untuk melihat bagaimana konsep kesejahteraan dalam perspektif ekonomi Islam dapat dilihat dari teori yang dikemukakan oleh Didi Suardi, kesejahteraan ekonomi syariah bertujuan mencapai kesejahteraan manusia secara menyeluruh, yaitu kesejahteraan material, kesejahteraan spiritual dan moral.

Konsep ekonomi kesejahteraan syariah bukan saja berdasarkan manifestasi nilai ekonomi, tetapi juga nilai spiritual dan moral. Konsep kesejahteraan dan kebahagiaan mengacu pada tujuan syariat Islam dengan terjaganya 5 prinsip dalam maqashid syariah, yakni terjaganya agama (*ad-din*), terjaganya jiwa (*an-nafs*), terjaganya akal (*al-aql*), terjaganya keturunan (*an-nasl*) dan terjaganya harta (*al-mal*).

Penerimaan program beras miskin jika dilihat dari segi ekonomi Islam, dapat dilihat dari 7 indikator:

1. Kesejahteraan ekonomi mencakup kesejahteraan individu, masyarakat dan negara

Kesejahteraan dalam perspektif ekonomi Islam memandang bahwa kesejahteraan bukan semata-mata hanya permasalahan

distribusi ekonomi secara materi tetapi juga menyangkut juga unsur non materi dan bidang-bidang lainnya, kesejahteraan dalam bidang lainnya yang berfungsi menopang dan saling menguatkan.

Kesejahteraan perekonomian yang berbasis syariah Islam, paradigma ini menjelaskan bahwa kesejahteraan masyarakat akan dapat tercapai apabila seluruh aktivitas manusia berlandaskan syariah, Indonesia termasuk yang menjadikan kesejahteraan bangsa sebagai tujuannya, rumusan kesejahteraan dituangkan dalam undang-undang dasar 1945 selain itu komitmen ini juga terjabarkan dalam batang tubuhnya, yakni Bab XIV pasal 33 tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan hasil di lapangan kesejahteraan belum tercapainya kesejahteraan individu dan masyarakat dalam pendistribusian program beras miskin, karena belum tepatnya sasaran bagi masyarakat penerima manfaat raskin (RTS-PM). Menurut Ibu Syarifah, *“beliau tidak merasakann manfaat dari program tersebut, sedangkan beliau dikategorikan orang yang seharusnya menerima manfaat”*. (Wawancara dengan Ibu Syarifah, 10 Mei 2022).

2. Tercukupinya kebutuhan dasar manusia, meliputi makan, minum, pakaian, tempat tinggal, jaminan sosial, kesehatan, pendidikan, keamanan dan sistem negara yang menjamin terlaksananya kecukupan kebutuhan dasar secara adil

Kesejahteraan dalam konsep masyarakat modern adalah sebuah kondisi dimana seseorang dapat memenuhi segala

kebutuhannya, seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, jaminan sosial, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan lainnya merupakan bagian dari kebutuhan jika 5 komponen diatas terpenuhi maka eksistensi kehidupannya akan terancam kesejahteraan dalam ekonomi syariah bertujuan mencapai kesejahteraan manusia secara menyeluruh yaitu kesejahteraan material, kesejahteraan spiritual dan moral.

Berdasarkan hasil di lapangan menurut perspektif ekonomi Islam belum memenuhi kesejahteraan untuk penerima manfaat program beras miskin, program ini hanya membantu kebutuhan pokok seperti beras tetapi tidak memenuhi kebutuhan dasar lainnya seperti pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan.

3. Penggunaan berdaya secara optimal, efisien, efektif, hemat dan tidak mubazir

Dalam ekonomi Islam merupakan setiap bentuk aktivitas yang dilakukan untuk mewujudkan manfaat atau menambahkannya dengan cara mengeksplorasi sumber-sumber-sumber ekonomi yang disediakan Allah SWT sehingga menjadi maslahat untuk memenuhi kebutuhan manusia.

4. Distribusi harta, kekayaan, pendapatan dan hasil pembangunan secara adil dan merata

Islam dalam berbagai aspek kehidupan manusia, khususnya dalam ekonomi, mengahdirkan sebuah konsekuensi bahwa segala kegiatan perekonomian, harus berjalan sesuai dengan syariat Islam,

baik dalam produksi, konsumsi maupun distribusi dengan demikian kesejahteraan dunia dan akhirat akan tercapai.

Berdasarkan hasil di lapangan menurut ekonomi Islam masih tidak tepatnya pendistribusian program beras miskin bagi masyarakat penerima bantuan ditinjau dari harta dan kekayaan belum tergolong adil, karena masyarakat yang mampu mendapatkan manfaat beras subsidi sedangkan masyarakat yang tergolong tidak mampu tidak mendapatkan bantuan tersebut.

5. Menjamin kebebasan individu

Manusia mempunyai potensi kebaikan dan kejahatan, telah diberikan kebebasan penuh oleh Allah SWT untuk memilihnya dengan segala konsekuensi di dunia dan akhirat kelak. Hal di atas dilihat dalam al-quran secara ekspilis maupun impilis, yang membicarakan tentang kebebasan manusia untuk menentukan sendiri perbuatan yang bersifat *ikhtiyariyah* yakni perbuatan yang dinisbatkan kepada manusia dan menjadi tanggung jawab karena kemampuan yang dimiliki untuk melakukan atau meninggalkannya, kebebasan tidak hanya mencakup persoalan teologi tetapi juga mencakup kebebasan ekonomi maupun politik.

Berdasarkan hasil di lapangan menjamin kebebasan individu tidak termasuk kedalam bentuk penyaluran program beras miskin karena jika setiap individu memiliki kebebasan individu setiap masyarakat berhak meminta atau mendapatkan beras subsidi tersebut.

6. Kesamaan hak dan peluang

Kesejahteraan dalam hukum ekonomi Islam membandingkan tentang konsep keadilan dalam hukum Islam yang berasal dari Allah SWT, yang bersifat menegakkan kesamaan/keadilan, kesamaan dalam kehidupan menjadi kebutuhan penting bagi manusia agar setiap orang bisa menyeimbangkan antara menuntut hak dan menjalankan kewajibannya.

Berdasarkan hasil di lapangan menurut perspektif Islam kesamaan hak dan peluang didalam pendistribusian program beras miskin tidak berjalan secara optimal karena hak warga yang seharusnya mendapatkan manfaat belum terlaksana dengan baik.

7. Kerjasama dan keadilan

Kerjasama dan keadilan merupakan faktor yang paling penting menurut agama Islam agar terjalin keseimbangan.

Berdasarkan hasil di lapangan menurut perspektif ekonomi Islam kerjasama dan keadilan dalam pendistribusian beras miskin tidak tepat, karena tidak adanya kerjasama yang baik dan kurangnya komunikasi antara pihak pendistribusian dan pihak yang mendata penerima beras subsidi tersebut sehingga terjadinya ketidakadilan dalam penyalurannya.

Keberadaan ekonomi Islam sebagai salah satu contoh umat muslim dalam bermuamalah secara ekonomi Islam tidak serta merta hanya mengacu pada aktifitas muamalah saja guna memenuhi kesejahteraan manusia melainkan ibadah pada Al-Qur'an dan Hadist dan juga Ekonomi Islam merupakan ilmu yang

mempelajari segala tingkah laku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh kedamaian dan kesejahteraan dunia dan akhirat, hal ini berarti aktifitas ekonomi Islam adalah aktifitas kolektif bukan individu.

Dalam Islam sendiri konsep distribusi sangat diutamakan yaitu ingin mensejahterakan pemeluknya di dunia dan akhirat dengan merealisasikan kemaslahatan di antara masyarakat sesuai dengan prinsip maqashid syariah yaitu dengan menghilangkan segala hal yang membawa kepada kerusakan, dengan demikian terpenuhinya hak yang semestinya sehingga tidak menimbulkan kesenjangan ekonomi pada masyarakat sesuai konsep Islam. Oleh karena itu, Islam berusaha keras untuk menegakkan distribusi yang adil di antara masyarakat, karena Allah sangat mengecam peredaran harta yang hanya terkonsentrasi di segelintir orang saja.

Komitmen Islam yang mendalam terhadap persaudaraan dan keadilan menyebabkan konsep kesejahteraan (Fallah) bagi semua umat manusia sebagai pokok tujuan Islam. Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam meliputi kepuasan fisik sebab kedamaian mental dan kebahagiaan hanya dapat dicapai melalui realisasi yang seimbang antara kebutuhan materi dan rohani dari personalitas manusia.

Islam mengakui kesejahteraan individu dan kesejahteraan sosial masyarakat yang saling satu dengan yang lainnya, bukannya saling bertentangan antara mereka. Dalam implementasi program beras untuk masyarakat miskin dalam meningkatkan kesejahteraan

masyarakat Desa Paloh Teungoh menurut perspektif Islam dapat dilihat dari nilai-nilai dasar dalam ekonomi Islam, yaitu:

a. Keadilan

Keadilan dalam hal ini adalah menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian dan konsisten pada kebenaran. Dalam implementasi program beras miskin di Desa Paloh Teungoh masih belum tepat sasaran terhadap pembagian beras subsidi tersebut, hal ini dapat dibuktikan bahwa masih ada masyarakat miskin yang tidak mendapatkan manfaat. Jadi, implementasi program beras miskin di Desa Paloh Teungoh belum sesuai dengan nilai dasar ekonomi Islam yaitu keadilan.

b. Pertanggung jawaban

Setiap pelaku ekonomi memiliki tanggung jawab untuk berperilaku ekonomi yang benar, amanah dalam mewujudkan kemaslahatan, juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum bukan kesejahteraan pribadi atau kelompok tertentu saja. Dalam implementasi program beras miskin di Desa paloh Teungoh masih ada saja pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mewujudkan kemaslahatan program ini dan dalam hal ini banyak pihak yang tidak amanah dalam tugasnya, karena masih ada saja yang memberikan manfaat beras subsidi kepada orang yang tidak tepat.

Jadi, dalam implementasi program beras miskin di Desa Paloh Teungoh masih kurangnya tanggung jawab sehingga tidak dapat terealisasi dengan baik.

c. Tafakul (jaminan sosial)

Adanya jaminan sosial di masyarakat akan mendorong terciptanya hubungan yang baik antara individu dan sesama masyarakat, karena Islam tidak hanya mengajarkan hubungan vertikal namun juga hubungan horizontal secara seimbang. Program beras subsidi untuk masyarakat miskin merupakan bentuk jaminan sosial pemerintah untuk masyarakat.

Berdasarkan kondisi diatas, bahwasanya implementasi program beras miskin di Desa Paloh Teungoh jika dilihat dari nilai-nilai dasar ekonomi Islam belum dapat dikatakan adil dan tanggung jawab, karena belum adanya kesadaran pihak pengelola dan masyarakat dalam mewujudkan atau merealisasikan program tersebut dengan baik. Namun hanya sebagai bentuk jaminan sosial yang diberikan pemerintah kepada masyarakat agar terciptanya suatu hubungan yang baik.

Informasi yang peneliti dapatkan dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi kepada masyarakat yang layak mendapatkan bantuan dan kepada masyarakat mampu mendapatkan bantuan pada hakikatnya yang seharusnya menerima bantaun beras miskin tersebut jika dinilai dari kriteria sangat bertolak belakang dengan permasalahan yang masyarakat alami yaitu tidak tepatnya pendistribusian beras miskin. Hal ini justru akan berdampak pada pada kecemburuan sosial antar masyarakat, sehingga kesejahteraan yang merupakan tujuan dari pemerintah untuk masyarakat miskin belum berhasil menurut peneliti.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Implementasi program beras miskin dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Paloh Teungoh belum terlaksana dengan baik. Program beras subsidi tersebut belum memenuhi indikator 6T, sedangkan keberhasilan program beras miskin diukur dengan tercapainya indikator tersebut. Adapun indikator yang belum terpenuhi dalam program beras miskin di Desa Paloh Teungoh yaitu belum tepat sasaran yang mana masih adanya masyarakat yang tergolong mampu mendapatkan manfaat tersebut sedangkan masyarakat yang layak menerima bantuan justru tidak mendapatkannya. Selain itu waktu penyaluran beras miskin juga belum terlaksana dengan baik karena disalurkan tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Pedum Raskin yaitu setiap bulan sekali, kemudian dari segi administrasi belum terlaksana dengan baik, karena tidak adanya persyaratan yang lengkap yang harus dilengkapi oleh rumah tangga sasaran penerima manfaat.
2. Implementasi program beras miskin dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Paloh Teungoh jika dilihat dari nilai-nilai dasar ekonomi Islam hanya satu yang terpenuhi yaitu Tafakul (jaminan sosial) sebagai bentuk jaminan sosial pemerintah untuk masyarakat dalam mendorong terciptanya

hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Sedangkan nilai-nilai dasar lainnya tidak terpenuhi dengan baik yaitu keadilan dan tanggung jawab. Sehingga program beras miskin di Desa paloh Teungoh belum dapat dikatakan sejahtera

5.2 Saran

1. Hendaknya aparat Desa Paloh Teungoh yang bertindak sebagai pelaksana pendistribusian program beras miskin selektif dalam mendata keluarga miskin sehingga tidak terjadi salah sasaran.
2. Diharapkan adanya kesadaran masyarakat mampu yang termasuk dalam rumah tangga sasaran untuk menerima bantuan subsidi lagi, sehingga masyarakat miskin yang seharusnya menjadi kriteria penerima manfaat dapat merasakan manfaat bantuan beras miskin tersebut.
3. Program beras miskin diharapkan dapat berlangsung secara optimal diseluruh wilayah Rumah Tangga Miskin (RTM). Dengan sistem pelaksanaannya yang sesuai dengan ketentuan Pedum Raskin, berdasarkan indikator 6T sehingga dapat mencapai keberhasilan sesuai konsep Islam.
4. Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk meningkatkan ketelitian dengan baik dalam kelengkapan data penelitian dan dapat mengmebangkan penelitian ini lebih luas dan mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan

Adnan. 2003. *Islam Sosialis Pemikiran Sistem Ekonomi Sosialis Religius Sjafrudin Prawinegara*. Yogyakarta: Menara Kudus Jogja. hal 131.

Alhudori, M. 2017. *Pengaruh IPM, PDRB dan Jumlah Pengangguran terhadap Penduduk Miskin di Provinsi Jambi*. *Jurnal of Economics and Business*. Vol 1 (1). hal 117-118.

Alimudin, I. *Konsep Kesejahteraan dalam Islam*. di akses <http://makasar.tribunnews.com>.

Arraiyah, H. 2017. *Meneropong Fenomena Kemiskinan Telaah Perspektif Al-Quran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hal 5.

----- .2017. *Meneropong Fenomena Kemiskinan Telaah Perspektif Al-Quran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hal 55-64.

----- .2017. *Meneropong Fenomena Kemiskinan Telaah Perspektif Al-Quran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hal 97-99.

Bungkaes, dkk. 2013. *Hubungan Efektivitas Pengelolaan Program Beras Miskin dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mamahan Kecamatan Gameh Kabupaten Kepulauan Talaund*. *Journal. "Acta Diurna"*. hal 98.

Chapra, U. 2000. *Islam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press. hal 6.

Cipta, H. 2019. *Konsep Islamic Ethic Marketing di Perbankan Syariah*. *Jurnal Asy Syar'iyah: Ilmu Syariah dan Perbankan Islam*. vol 4. hal 16.

Departemen Agama RI. *Op. Cit*. hal 225.

- Hastuti, Q.A. 2016. *Infaq Tidak Dapat di Kategorikan Sebagai Pungutan Liar*. Jurnal ZISWAF. vol. 3.
- Huda, Nurul., Dkk. 2015. *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jakarta: Kencana. hal 20-21.
- Ishom, M. *Hadits Tentang Kemiskinan*. Nahdiatul Ulama Onlie di akses Senin 18 Januari 2021.
- Itang. 2017. Jurnal Keislaman, *Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan, TAZKIYA*. Vol. 16(1).
- Jurnal Perikanan dan Kelautan. *analisis pendapatan dan kesejahteraan masyarakat nelayan danau bawah kecamatan dayun kabupaten Siak provinsi Riau*. hal. 23.
- Karim, A.A. 2012. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hal 62.
- Kementerian Agama RI. *QS. Al-Imran ayat 104*.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. *Penjelas I : Pemantauan, Pengawasan Evaluasi, Audit dan Pelaporan (Petunjuk Teksis Operasional)*. Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. hal 5.
- Naqvi, S.N.H. 2003. *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hal 136.
- Noor, Ruslan Abdul G. 2013. *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hal 63.
- .*Op Cit*. hal 89.
- Pedoman Umum (Pedum) Raskin. 2015.
- Prasetya, F dan Pangestuty, F.W. 2021. *Analisis Kebijakan Publik : Pendekatan ekonomi dan Studi Kasus*. Malang: UB Press. hal 197.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). *Op cit*. hal 2-4.

- Qaradaghi, Syaikh Muhammad M. *Al-Falah As Sunnah*. di akses <http://www.qaradaghi.com>.
- Rudy, B. *Op Cit*. hal 148.
- Setiawan, F. 2016. Kemiskinan dan Pengentasannya dalam Pandangan Islam. *Jurnal DINAR Ekonomi Syariah*. vol. 1(1). hal 7.
- Shihab, M.Q. 2014. *Wawasan Al-Quran Tafsir Tematik Atas berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan. hal 594.
- .2000. *Wawasan Al-Qur'an : Tafsir Maudhu'l atas Berbagai Persoalan Umat*, Bandung :Mizan. hal 127.
- ,di akses dari <http://www.bps.go.id/link>.
- Sodiq, A. 2015. Konsep Kesejahteraan Dalam Islam. vol. 3. hal 11
- 2015. Konsep Kesejahteraan Dalam Islam. vol. 3. hal 13.
- Sukmasari, D. 2020. Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal of Qur'an and Hadis Studies*. vol 3. hal 12.
- Suryawatti, C. 2005. *Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional*. *JMPK*. vol. 8(3). hal 122.
- Syamsuri. 2018. *Ekonomi Pembangunan Islam : Sebuah Prinsip, Konsep dan Asas Falsafahnya*. UNIDA Gontor Press. hal 205.
- The national team for the accleration of peverty reduction. di akses dari <http://www.tnp2k.go.id>.
- Urif, U.Z dan Aulia, S.M. 2019. Telaah Konsep Distribusi Kekayaan Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*. vol. 10. hal 5.
- Wulandari, Nike Roso.2016. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan rumahtangga di Kota Kendari tahun 2014. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan*. vol. 1(1). hal 112.

LAMPIRAN
PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan untuk Keuchik dan Pengurus Raskin

1. Bagaimana prosedur pemberian Raskin ?
2. Siapa saja kategori yang mendapatkan Raskin ?
3. Apakah pembagian Raskin sudah tepat sasaran ?
4. Apakah terdapat warga miskin yang tidak mendapatkan jatah Raskin ?
5. Bagaimana kualitas beras miskin di Desa Paloh Teungoh ?
6. Kapan beras Raskin disalurkan kepada masyarakat ?
7. Apakah beras Raskin disalurkan tepat waktu ?
8. Bagaimana respon masyarakat miskin terhadap bantuan Raskin?

Pertanyaan untuk masyarakat

1. Apakah anda termasuk golongan orang yang menerima beras Raskin ?
2. Berapa jumlah yang anda terima saat pembagian beras Raskin ?
3. Berapa harga yang harus anda bayar saat menerima Raskin ?
4. Apakah pembagian beras miskin sudah tepat sasaran ?
5. Apakah pelaksanaan beras Raskin tepat waktu dan apakah pernah terlambat ?
6. Bagaimana kualitas beras yang diterima, apakah sudah bagus ?
7. Apakah Aparat Gampong melayani dengan baik ?

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Kepala Desa dan Pengelola Beras Miskin



Wawancara Dengan Penerima Beras Miskin



Wawancara Dengan Penerima Beras Miskin



Wawancara Dengan Penerima Beras Miskin



Wawancara Dengan Penerima Beras Miskin



Wawancara Dengan Penerima Beras Miskin